



**PENGARUH INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS,
PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, DAN
TEKANAN WAKTU TERHADAP KUALITAS
PENGAWASAN ATAS KEGIATAN YANG
DIBIAYAI DARI PINJAMAN
LUAR NEGERI**

(Studi Kasus Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

BURHANUDDIN

1925100597

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
2022**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, DAN TEKANAN WAKTU TERHADAP KUALITAS PENGAWASAN ATAS KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI (STUDI KASUS PADA KANTOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

NAMA : BURHANUDDIN
N.P.M : 1925100597
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 15 September 2022



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si

Dr. Oktiani Khamidah Siregar, SE., M.Si

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Bagus Handoko, S.E., M.Si

Dr. Ratima br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : BURHANUDDIN
NPM : 1925100597
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S I (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS,
PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, DAN
TEKANAN WAKTU TERHADAP KUALITAS
PENGAWASAN ATAS KEGIATAN YANG
DIBAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI
(STUDI KASUS PADA KANTOR BPKP
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpad untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

Medan, September 2022



Burhanuddin
1925100597

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BURHANUDDIN
Tempat / Tanggal Lahir : B. Kubu / 26-03-1996
NPM : 1925100597
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : DUSUN VII DESA PEMATANG JERING
KECAMATAN SEI SUKA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan

datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 21 September 2022

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Pengawasan Atas Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris bahwa Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Tekanan Waktu memberi pengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Pengawasan Atas Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditor intern pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Kuesioner penelitian ini diukur menggunakan skala likert. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan diuji dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis data dengan menggunakan aplikasi *SPSS Statistics 20*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, independensi, pengalaman kerja, dan kompetensi tidak mempengaruhi Kualitas Pengawasan Atas Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri secara signifikan. Secara simultan, Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Tekanan Waktu berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pengawasan Atas Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, Tekanan Waktu, Kualitas Pengawasan

ABSTRACT

This research is entitled "The Influence of Independence, Objectivity, Work Experience, Competence, and Time Pressure on the Quality of Supervision of Activities Funded by Foreign Loans (Case Study at the BPKP Representative Office of North Sumatra Province)". The purpose of this study is to find empirical evidence that independence, objectivity, work experience, competence, and time pressure have a partial and simultaneous influence on the quality of supervision of activities financed by foreign loans. The population used in this study were all government internal auditors at the BPKP Representative for North Sumatra Province. The research sample was determined using purposive sampling. This research questionnaire was measured using a Likert scale. Data were analyzed using multiple linear regression analysis and tested with data quality test, classical assumption test, and data hypothesis test using SPSS Statistics 20 application. The results of this study indicate that partially, independence, work experience, and competence do not affect the Quality of Top Supervision Activities Funded From Foreign Loans significantly. Simultaneously, independence, objectivity, work experience, competence, and time pressure have a significant effect on the quality of supervision of activities financed by foreign loans at BPKP representatives in North Sumatra Province.

Keywords: Independence, Objectivity, Work Experience, Competence, Time Pressure, Quality Supervision



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan hidayah-Nya yang memberikan kesehatan dan keselamatan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Skripsi berjudul **“Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)”**, disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Bapak Bagus Handoko, S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsisaya.

5. Ibu Dr. Rahima br Purba, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk memberikan bimbingan dan masukan bagi perbaikan skripsi saya.
6. Bapak Junawan, S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik penulis.
7. Kedua orangtua penulis, Ibunda tercinta Alm. Rama Dewi dan Ayahanda tercinta Syamsul Bahri serta Ibu sambung saya, Ibu Maidawati yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada penulis.
8. Kepada istri penulis, Ade Ariyani, S.Pd. dan kedua anak penulis Carim Hanif Burhan serta Dzakir Hanan Burhan, yang telah memberikan dukungan semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.
9. Bapak/Ibu pimpinan di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan ilmu, pengalaman, dan inspirasi bagi penulis.
10. BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara selaku Instansi yang menjadi objek penelitian.
11. Kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Medan, September 2022
Penulis

BURHANUDDIN
1925100597

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	11
1.2.1 Identifikasi Masalah	11
1.2.2 Batasan Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.4.2 Manfaat Penelitian	14
1.5 Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Teori Keagenan	18
2.1.2 Teori Atribusi	19
2.1.3 Pengawasan	20
2.1.3.1 Pengertian Pengawasan.....	20
2.1.3.2 Kualitas Pengawasan.....	25
2.1.3.3 Pegawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri	27
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengawasan	29
2.1.4.1 Independensi	29
2.1.4.2 Objektivitas	30
2.1.4.3 Pengalaman Kerja	31

2.1.4.4 Kompetensi	32
2.1.4.5 Tekanan Waktu	32
2.2 Penelitian Sebelumnya	33
2.3 Kerangka Konseptual	36
2.4 Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan Penelitian	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.2.1 Lokasi Penelitian	40
3.2.2 Waktu Penelitian	40
3.3 Populasi dan Sampel	41
3.3.1 Populasi	41
3.3.2 Sampel	41
3.3.3 Jenis dan Sumber Data	43
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.4.1 Variabel Penelitian	43
3.4.2 Definisi Operasional	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisa Data	48
3.6.1 Uji Kualitas Data	48
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	50
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	51
3.6.4 Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Profil Instansi	56
4.1.2 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi	58
4.1.3 Deskripsi Data	66
4.1.4 Karakteristik Responden	67
4.1.5 Analisis dan Evaluasi	71
4.1.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	92
4.1.7 Hasil Uji Hipotesis	94
4.2 Pembahasan.....	100
4.2.1 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Pengawasan	101
4.2.2 Pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Pengawasan	103
4.2.3 Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Pengawasan ...	105
4.2.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Pengawasan	106
4.2.5 Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan	107
4.2.6 Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110

5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	111
5.2.1 Saran Operasional.....	111
5.2.2 Saran Akademis	113

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

BIODATA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Kegiatan yang Dilakukan Pengawasan.....	28
Tabel 2.2 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	33
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian	41
Tabel 3.2 Definisi Operasional	44
Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner.....	67
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	68
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	69
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	70
Tabel 4.6 Hasil Pengolahan Data SPSS untuk Variabel Independensi (X1)	73
Tabel 4.7 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Independensi (X1).....	74
Tabel 4.8 Hasil Pengolahan Data SPSS untuk Variabel Objektivitas (X2).....	75
Tabel 4.9 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Objektivitas (X2).....	76
Tabel 4.10 Hasil Pengolahan Data SPSS untuk Variabel Pengalaman Kerja (X3) ...	77
Tabel 4.11 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Pengalaman Kerja (X3).....	78
Tabel 4.12 Hasil Pengolahan Data SPSS untuk Variabel Kompetensi (X4)	79
Tabel 4.13 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Kompetensi (X4).....	80
Tabel 4.14 Hasil Pengolahan Data SPSS untuk Variabel Tekanan Waktu (X5)	81
Tabel 4.15 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Tekanan Waktu (X5).....	82
Tabel 4.16 Hasil Pengolahan Data SPSS untuk Variabel Kualitas Pengawasan (Y).	83
Tabel 4.17 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Kualitas Pengawasan (Y)	84
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas	87
Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas	89
Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinieritas	90
Tabel 4.21 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	92
Tabel 4.22 Hasil Uji Parsial (Uji t)	96
Tabel 4.23 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	99
Tabel 4.24 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Kejadian atas Temuan Tahun 2018 s.d 2021	6
Gambar 2.1 Kerangka Konspetual	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	59
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa dikenal dengan APBN merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan suatu acuan bagi Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Setiap tahunnya, APBN direncanakan, ditetapkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu fungsi APBN adalah sebagai salah satu instrumen dalam menentukan kebijakan perekonomian di Indonesia. Selain itu, APBN juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta kesinambungan fiskal di Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tata kelola APBN yang baik, pemerintah mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan amanat Undang-Undang tentang APBN yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Jumlah pendapatan dan jumlah belanja negara dalam APBN disusun dalam besaran yang sama. Dalam pelaksanaannya, jika pendapatan negara lebih rendah dari belanja negara, maka pemerintah akan melakukan pembiayaan untuk menutupi kekurangan belanja negara atau biasa dikenal dengan defisit anggaran. Jika terjadi defisit anggaran, maka dibutuhkan adanya penerimaan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri baik dalam bentuk utang/*loan* maupun non-utang (hibah).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pinjaman

Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Pinjaman Dalam Negeri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

Bentuk dan jenis pinjaman luar negeri diterima dan diperoleh dari lembaga keuangan, lembaga non keuangan, negara asing, dan lembaga bilateral maupun multilateral yang memiliki hubungan diplomatis dengan pemerintah Indonesia serta melaksanakan kegiatan dan berdomisili di luar wilayah Indonesia. Salah satu contoh lembaga pemberi pinjaman/utang luar negeri adalah seperti *World Bank*, *Islamic Development Bank (IsDB)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *International Fund for Agriculture Development (IFAD)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan sebagainya. Sementara contoh pinjaman dalam negeri ialah adanya penerbitan Surat Berharga Negara seperti *Savings Bond Ritel*, Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Tabungan, Sukuk Ritel Indonesia, dan produk Surat Berharga Negara lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang disusun dan dilaporkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dilakukan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berfokus terhadap beberapa sektor, diantaranya pertahanan dan keamanan, pendidikan, infrastruktur, energi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan Teknologi

Informasi, dan sebagainya. Pelaksanaan pinjaman luar negeri dikelola secara cermat dan tepat serta dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir risiko kesalahan baik secara hukum maupun kerugian secara ekonomi. Penerapan tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta prinsip kehati-hatian merupakan suatu hal wajib dipedomani dalam pelaksanaan Pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik (*Public Trust*) maupun kepercayaan lembaga/non lembaga pemberi pinjaman (*lender*). Dikutip dari berita yang dimuat dalam CNN Indonesia pada 22 April 2021, Lembaga Pemeringkat asal Jepang, *Rating and Investment Information, Inc* (R&I) mempertahankan peringkat utang luar negeri (*Sovereign Credit Rating*) Indonesia pada BBB+ dengan *outlook* stabil pada 22 April 2021. Dengan peringkat itu, Indonesia dikategorikan *investment grade* atau layak investasi.

Pengelolaan anggaran pinjaman/pembiayaan luar negeri yang cukup besar, berpotensi terjadinya kecurangan dan penyimpangan yang mengarah kepada tindak korupsi ataupun ketidaktepatan sasaran, waktu, dan jumlah yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sangat mungkin akan terjadi. Untuk mengurangi dan menghilangkan potensi kecurangan dalam pengelolaan ini, diperlukan pengawasan dalam setiap tata kelola dan manajemennya. Seluruh dana yang digunakan oleh pengguna anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan pemerintah selaku penerima pinjaman. Pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan merupakan tiga aspek yang sangat penting agar terciptanya tata kelola yang baik terhadap pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah mewujudkan tata kelola sistem pemerintahan yang

baik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta menciptakan suatu sistem peringatan dini (*early warning system*) atas pengelolaan dan pelaksanaan keuangan negara terkhusus atas pinjaman/dan atau hibah luar negeri, pada 28 Agustus 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah aturan tentang suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Bentuk kegiatan pengendalian intern dapat berupa audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain yang berkaitan dengan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas atas suatu kegiatan maupun program yang ada dalam suatu unit organisasi. Pelaksanaan pengawasan intern dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern, salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peran dan fungsi BPKP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang berkaitan dengan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara diantaranya kegiatan pengawasan intern yang berhubungan dengan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Disamping itu, BPKP selaku lembaga independen dalam melakukan pengawasan intern juga mendapat kepercayaan dari para lembaga/non

lembaga donor (*lender*) untuk melakukan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, dan verifikasi terhadap kegiatan yang anggarannya berasal dari pembiayaan dari lembaga/non lembaga donor (*lender*).

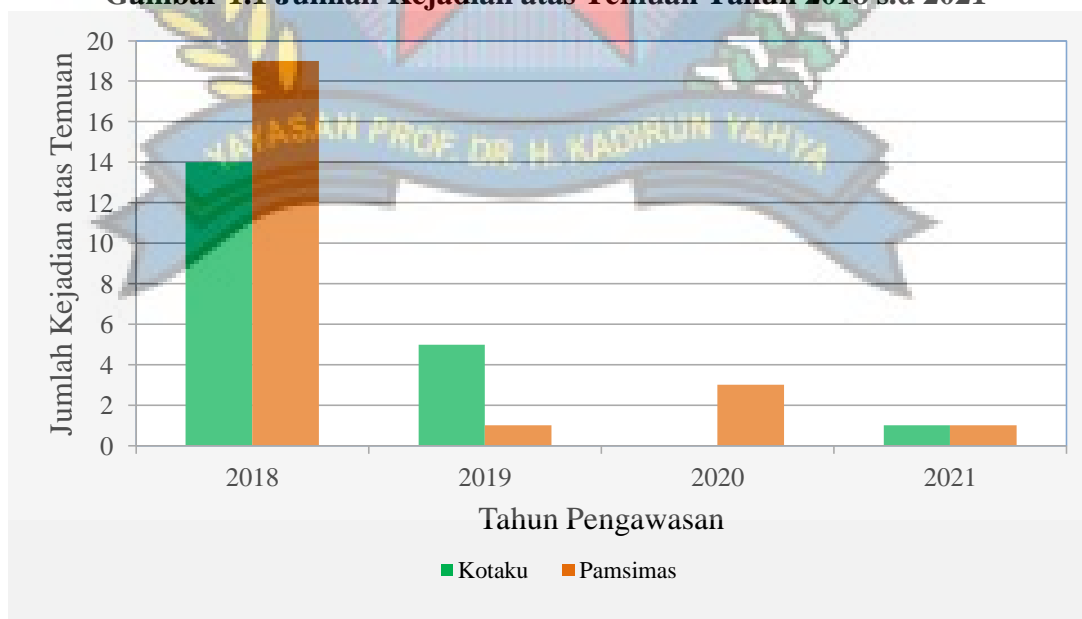
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Peronomian dan Kemaritiman, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa kegiatan pengawasan intern yang berhubungan dengan pinjaman luar negeri yang dilakukan pengawasan oleh BPKP dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diantaranya seperti Audit atas laporan keuangan *The Support to Development of The Islamic Higher Education Project Loan* IsDB IND-0164, Audit atas laporan keuangan pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/*National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan IDB No 174,175,176 IDN*, Audit atas laporan keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/Pamsimas III (*Loan IBRD No. 8578-ID*), Audit atas Laporan Keuangan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) Kementerian Pertanian Loan IFAD Number 2000001445*, dan sebagainya. Seluruh kegiatan dan program yang ada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang telah disusun. Sama halnya dengan kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP berpedoman dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Kualitas pengawasan yang dilakukan BPKP harus dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kepercayaan dari para *stakeholder* seperti masyarakat dan pemberi pinjaman/*lender* serta dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai atas kegiatan maupun program yang dilaksanakan serta memastikannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menghasilkan kualitas hasil pengawasan yang baik, diperlukan sumber daya auditor yang independen, kompeten, dan

berpengalaman dalam melakukan pengawasan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola kegiatan dan program yang dananya bersumber dari pinjaman.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh auditor BPKP terhadap kegiatan maupun program yang dibiayai dari sumber dana pinjaman, sebagian auditor masih terbilang lemah dalam mendeteksi kecurangan, kelemahan sistem pengendalian intern, penerapan akuntabilitas biaya atas kegiatan maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat diketahui dari data jumlah kejadian atas temuan dan permasalahan yang peneliti peroleh dari Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil pengawasan atas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari tahun pengawasan 2018 sampai dengan tahun pengawasan 2021.

Gambar 1.1 Jumlah Kejadian atas Temuan Tahun 2018 s.d 2021



Sumber: Data diperoleh dari Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) BPKP dan diolah oleh Penulis, 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik, terjadi penurunan jumlah

kejadian atas temuan dari hasil pengawasan atas kegiatan yang sumber pendanaannya dari Pinjaman Luar Negeri/*Loan* yaitu Program PAMSIMAS dan Program KOTAKU dari tahun pengawasan 2018 sampai dengan tahun pengawasan 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti kurangnya pengalaman dari pada auditor terkait, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor dalam menguasai aturan dan pedoman pengawasan, dan lemahnya independensi serta objektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan yang mungkin bisa saja terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara berulang setiap tahunnya atas kegiatan yang sama, memiliki potensi terbenturnya independensi dan objektivitas auditor pada saat melakukan pengawasan. Selain itu, terbatasnya waktu pengawasan juga menjadi titik lemah dalam auditor untuk dapat mendeteksi lebih dalam terkait potensi penyimpangan maupun kecurangan yang terjadi. Terhadap seluruh hasil pengawasan atas kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman kualitas pengawasan yang harus dicapai oleh auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ialah harus dapat meningkatkan kepercayaan yang memadai bagi para *stakeholder* terkait, seperti masyarakat dan lembaga pemberi pinjaman.

Dikutip dari berita yang dimuat dalam portal media massa *online* detiknews pada hari kamis, tanggal 25 Juli 2013, diketahui bahwa seorang auditor BPKP menerima uang dari anggaran kegiatan *joint* audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Uang yang diterima oleh auditor yang bersangkutan diakui telah dikembalikan ke KPK. Perilaku atau perbuatan auditor tersebut tidak sesuai dengan prinsip objektivitas sebagaimana yang terdapat dalam Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AIPD) Tahun 2014 yaitu auditor intern pemerintah wajib tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga

mengganggu pertimbangan profesionalnya.

Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Samsi menyimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit (Samsi, 2012). Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sukriah yang menemukan bukti empiris bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit (Sukriah, 2009).

Pusdiklatwas BPKP (2014), menyatakan Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Maburi dan Winarna (2010) menyatakan semakin tinggi objektivitas auditor, maka semakin baik kualitas auditnya. Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas.

Pengalaman auditor dicerminkan dalam lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan (BPKP, 2005). Pengalaman kerja dapat diartikan sebagai pengalaman seorang auditor dalam melakukan audit dan

dilihat dari segi lamanya waktu seseorang bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan ataupun pengawasan yang sudah dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan Sukriah dkk (2009) menjelaskan bahwa pengalaman kerja, obyektifitas serta kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dengan demikian, semakin banyak pengalaman kerja, semakin obyektif auditor melakukan pemeriksaan dan semakin tinggi tingkat kompetensi yg dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin tinggi atau semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukannya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Samsi dkk (2013). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fietoria dan Elisabeth Stefany Manalu (2016) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan/keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang mencakup kemampuan berfikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasan emosional, pengalaman, daya juang, sikap positif, keterampilan kerja serta kondisi kesehatan yang baik yang bisa dibuktikan atau diperagakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Yusuf, 2014). Pusklatwas BPKP (2014) Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sukriah dkk. (2009) menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Hal tersebut diartikan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang auditor, akan semakin baik kualitas hasil audit/pengawasannya. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Kovinna dan Betri (2014) yang menyatakan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Tekanan Waktu adalah batasan waktu yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan suatu pengawasan ataupun pemeriksaan. Dalam rentang jangka waktu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan, auditor harus bisa melaksanakan seluruh prosedur ataupun program kerja pengawasan yang telah direncanakan. Tekanan waktu sangat memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil pengawasan yang dilakukan oleh seorang auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Kurnia dkk. (2014) menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut juga sejalan dengan Basuki dan Mahardhani (2006) bahwa keberadaan anggaran waktu yang ketat telah dianggap suatu hal yang lazim dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja lebih keras dan efisien.

Penelitian mengenai Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara) merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya mengenai kualitas hasil audit pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh K. Haryoko dkk. (2017), yang meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Obyektivitas, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kompetensi, Objektivitas, dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kualitas Hasil Audit.

Alasan peneliti menambahkan variabel independensi dan tekanan waktu dari penelitian sebelumnya adalah karena variabel independensi dan tekanan waktu memiliki peranan penting sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan.

Atas dasar latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, peneliti

mengangkat judul “**Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)**”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain :

1. Lemahnya independensi dan objektivitas dari auditor internal yang dapat mempengaruhi kepercayaan *stakeholders*.
2. Lemahnya sistem tata kelola dan pengawasan terhadap kegiatan yang sumber dananya berasal dari pinjaman luar negeri mengakibatkan utang negara meningkatkan namun tidak diiringi dengan hasil kegiatan yang dapat mensejahterakan rakyat.
3. Kurangnya kompetensi, pengalaman kerja seorang auditor, dan terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan berpotensi dengan tidak terdeteksinya kecurangan dan permasalahan secara memadai yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Sikap objektivitas dan independensi auditor yang rendah menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat diyakini kebenaran aspek akuntabilitas, transparansi, dan telah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Adanya ketidakkonsistenan dari penelitian sebelumnya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pengawasan.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pembatasan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri. Hal ini agar hasil penelitian dapat terfokus dan tidak menghasilkan penafsiran yang menyimpang. Peneliti membatasi masalah pada lima faktor yang mempengaruhi Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri diantaranya Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri ?
2. Apakah Objektivitas Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri ?
3. Apakah Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri ?
4. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri ?
5. Apakah Tekanan Waktu pengawasan yang dilakukan oleh Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri ?
6. Apakah Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan

Waktu secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Objektivitas Auditor terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Tekanan Waktu pengawasan yang dilakukan oleh Auditor terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
6. Untuk mengetahui Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu secara simultan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian mengenai Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara) memiliki manfaat dalam bidang rumpun ilmu pengetahuan khususnya akuntansi. Adapun manfaat teoritis mengenai Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara) adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan audit maupun pengawasan internal yang membahas tentang Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi dan referensi pada penelitian yang berkaitan dengan kualitas pengawasan

guna meningkatkan kinerja dan kualitas pengawasan pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis mengenai Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan auditor terkait untuk senantiasa menghasilkan kualitas pengawasan yang baik, bermanfaat, dan berkualitas agar dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* kepada BPKP sebagai auditor internal pemerintah Republik Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian dari Kukuh Haryoko, dkk. (2017) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Obyektivitas, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara”

Hasil dari penelitian dari Kukuh Haryoko, dkk (2017) menunjukkan bahwa Kompetensi, Obyektivitas, dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas hasil audit.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Model Penelitian : penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi (X_1), obyektivitas (X_2), dan pengalaman kerja (X_3) sebagai variabel independen terhadap kualitas hasil audit sebagai variabel dependen. Teknis analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dan teknik pengambilan sampel secara *pusposive sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu Independensi (X_1), Objektivitas (X_2), Pengalaman Kerja (X_3), Kompetensi (X_4), dan Tekanan Waktu (X_5) dengan kualitas pengawasan (Y) sebagai variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dan teknik pengambilan sampel secara *pusposive sampling* yang akan digunakan dalam penelitian ini.
2. Variabel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 3 Variabel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit. Penelitian ini menggunakan 5 Variabel dengan 2 Variabel yang berbeda dari Variabel sebelumnya, untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pengawasan.
3. Jumlah observasi/sampel : Populasi dalam penelitian terdahulu adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang berjumlah 117 orang, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 58 Responden Auditor Intern pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan kriteria auditor yang pernah menjalankan tugas pengawasan yang berkaitan dengan pinjaman/*loan*. Penentuan sampel ditentukan dengan cara menetapkan kriteria tertentu (*purposive sampling*).

4. Waktu Penelitian : penelitian tersebut dilakukan tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022.
5. Lokasi Penelitian : lokasi penelitian terdahulu melakukan Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, penelitian ini melakukan Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menjelaskan bahwa teori keagenan atau *agency theory* adalah suatu hubungan berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam suatu perusahaan atau entitas, yakni *principal* (pemilik) dan *agent* (agen) sebagai pelaku utama. Dalam teori keagenan ini juga dijelaskan mengenai hubungan keagenan yang diartikan sebagai suatu hubungan yang timbul karena adanya suatu kontrak atau perikatan yang telah ditetapkan oleh dua pihak, yaitu *principal* yang disebut pihak yang mendelegasikan pekerjaan dan *agent* yaitu pihak yang menerima pendelegasian pekerjaan tersebut. *Principal* selaku pihak yang mendelegasikan pekerjaan akan menggunakan jasa dari *agent* untuk melakukan pekerjaan yang menjadi kepentingan *principal*. Dengan demikian, *agent* selaku pihak yang menerima delegasi wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat/tanggung jawab yang diberikan oleh *principal*.

Di dalam suatu tata kelola pemerintahan, instansi yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan (BPKP) merupakan *agent* yang diberi tanggung jawab oleh *principal* yaitu *stakeholders* seperti presiden, masyarakat, dan pihak pemberi pinjaman (*lender*) untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Hubungan dan pemberian mandat ini secara tidak

langsung menciptakan suatu kontrak/perikatan antara *principal* dan *agent*. Hubungan kontrak ini memungkinkan untuk terjadinya *conflict of interest* (konflik kepentingan) antara instansi yang melakukan pengawasan dengan para *stakeholders*. BPKP selaku pengawas intern yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan untuk kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri memiliki informasi lebih banyak terkait dengan capaian output dan memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan para *stakeholders*. *principal* dalam hal ini BPKP, wajib memberikan informasi ataupun sinyal dan keyakinan secara memadai kepada para *stakeholders*. Sinyal yang diberikan berupa informasi hasil pengawasan yang dapat diandalkan dan dipercaya secara memadai oleh *stakeholders* (Ali, 2002 dalam Setyaningrum, 2013).

2.2.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang sebagaimana dinyatakan oleh Fritz Heider selaku pencetus teori atribusi. Dalam teori atribusi dijelaskan bagaimana proses kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Dalam teori atribusi dijelaskan juga tentang bagaimana penyebab perilaku individu itu sendiri atau perilaku orang lain yang akan ditentukan apakah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu ataupun faktor internal seperti sifat, karakter, sikap, dan lain sebagainya yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans dalam Ayuningtyas (2012).

Dalam Ayuningtyas (2012), Luthans menyatakan, “Dalam hidupnya, seseorang membentuk pemikiran tentang orang lain dan situasi di sekitarnya, dan pemikiran tersebut mengarah pada perilaku seseorang dalam persepsi sosial,

yang disebut atribusi karakter dan atribusi situasional”. Atribusi karakter atau penyebab intrinsik mengacu pada aspek perilaku pribadi yang ada dalam diri seseorang, seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan atribusi situasional atau penyebab eksternal mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai sosial, dan cara pandang masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai dasar teori penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan oleh auditor. Untuk menghasilkan kualitas pengawasan yang lebih baik, diperlukan faktor internal maupun eksternal dari auditor untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Karakteristik pribadi auditor merupakan salah satu penentu kualitas pengawasan, karena merupakan faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitasnya. Pada saat yang sama, kondisi sosial auditor merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.

2.2.3 Pengawasan

2.2.3.1 Pengertian Pengawasan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Intern didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan intern pemerintah merupakan

fungsi manajemen yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui pengawasan internal yang dilakukan, pemerintah akan dapat mengetahui titik kelemahan dalam tata kelola pemerintahan dan memastikan apakah instansi pemerintah tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif, serta telah sesuai dengan tujuan dan rencana serta kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Selain dari pada itu, pengawasan intern dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan sangat diperlukan untuk mendorong tercipta dan terwujudnya *clean goverment* dan *good governance* dan dalam rangka didukungnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bersih serta bebas dari praktik-praktik yang menyebabkan penyimpangan dan penyelewengan wewenang dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Sukarna dalam Jufrizen (2016) “pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan agar seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk teknis dan aturan terkait pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dari tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai”.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan pengawasan diantaranya ialah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut.

1) Perencanaan pengawasan diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pengawasan dan dapat tercapai secara berkualitas, efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam melakukan perencanaan pengawasan,

auditor menetapkan dasar pelaksanaan pengawasan, sasaran, ruang lingkup pengawasan, metodologi, dan alokasi sumber daya manusia maupun biaya yang diperlukan. Selain dari pada itu, pada tahap perencanaan pengawasan seorang auditor juga harus dapat mempertimbangkan berbagai hal termasuk identifikasi risiko pengawasan, sistem pengendalian intern dan ketaatan entitas yang menjadi objek pengawasan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta memetakan titik rawan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Seluruh aktivitas yang dilaksanakan pada tahap perencanaan pengawasan harus didokumentasikan oleh auditor. Pada tahap perencanaan pengawasan inilah seorang auditor menyusun rencana program kerja pengawasan yang telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pengawasan.

2) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan pengumpulan dan pengujian bukti-bukti, pengembangan temuan, dokumentasi, dan supervisi. Bukti-bukti yang relevan, cukup, dan kompeten harus dapat dikumpulkan dan diuji oleh seorang auditor untuk mendukung kesimpulan, temuan, dan rekomendasi terkait. Setelah bukti-bukti tersebut dikumpulkan, auditor melakukan pengujian guna untuk menguji dan menilai ketepatan serta kesesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan ataupun peraturan-peraturan terkait. Ketika terdapat ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan ketidakekonomisan dalam pengelolaan kegiatan, program, dan organisasi atas entitas yang diawasi, maka akan menghasilkan suatu temuan. Selain itu, kelemahan atas sistem pengendalian internal dan

adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan juga termasuk salah satu bentuk temuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Temuan dari hasil pengawasan harus dapat memenuhi unsur-unsur seperti kondisi, kriteria, sebab dan akibat dari penyimpangan dari kriteria dan aturan yang ada. Seluruh bukti dan bentuk pengujian atas bukti-bukti yang mendukung temuan dan permasalahan terkait harus didokumentasikan oleh auditor dalam kertas kerja pengawasan. Seluruh dokumentasi tersebut harus dapat dilaksanakan dan disimpan secara rapi, tertib, dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dianalisis, dan dirujuk kembali. Informasi-informasi yang masuk dalam dokumentasi pengawasan menggambarkan catatan penting mengenai pekerjaan yang dilaksanakan auditor sesuai dengan standar dan kesimpulan. Dokumentasi atas pelaksanaan pengawasan minimal harus berisi tentang tujuan, lingkup, metodologi, kriteria penentuan uji petik (*sampling*), dan kriteria ataupun standar yang tidak diterapkan oleh entitas yang diawasi beserta penyebab dan akibatnya. Selanjutnya seluruh pelaksanaan pengawasan dilakukan supervisi pada setiap jenjangnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan tercapainya sasaran, tujuan dari pengawasan, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor. Selain itu, proses supervisi ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa tim pengawas memahami tujuan dan rencana pengawasan, pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan, seluruh program dan prosedur pengawasan dilaksanakan, seluruh kertas kerja pengawasan dan bukti-bukti terkait didokumentasikan, dikumpulkan,

dan diuji secara memadai, dan tujuan dari pengawasan tercapai.

3) Pelaporan pengawasan merupakan tahap yang dilakukan oleh auditor untuk mengkomunikasikan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan kepada entitas yang dilakukan pengawasan dan para pemangku kepentingan yang memerlukan laporan hasil pengawasan atas kegiatan yang diawasi. Selain itu, tahap pelaporan pengawasan juga berguna untuk menjadi bahan dan tindakan perbaikan dan evaluasi bagi entitas yang diawasi dan pihak terkait lainnya dan menghindari kesalahpahaman atas temuan hasil pengawasan. Pelaporan pengawasan yang dituangkan dalam laporan harus dibuat secara tertulis untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atas kesimpulan, temuan dan permasalahan, dan rekomendasi ataupun saran yang diberikan oleh auditor.

4) Pemantauan tindak lanjut dari temuan hasil pengawasan merupakan tahapan yang tidak kalah penting ketika seorang auditor melakukan pengawasan. Auditor harus dapat mengkomunikasikan kepada entitas atau objek yang diawasi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan-temuan dan permasalahan yang dijumpai pada saat pengawasan berada pada entitas atau objek yang diawasi. Pengkomunikasian ini penting dan diperlukan agar entitas yang diawasi dapat mengambil langkah atau tindakan konkrit dalam penyelesaian atas temuan yang ada. Pengabaian atas temuan dan permasalahan yang ada dapat memperburuk keadaan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2.2.3.2 Kualitas Pengawasan

Besarnya manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengawasan tidak terletak pada permasalahan dan temuan-temuan yang dijumpai ketika melakukan kegiatan pengawasan atau seberapa banyak rekomendasi yang diberikan kepada satuan kerja yang dilakukan pengawasan, akan tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian permasalahan tersebut dan tidak menjadi permasalahan yang berulang oleh entitas/satuan kerja yang dilakukan pengawasan. Pengawasan yang berkualitas harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk tercapainya tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Kualitas pengawasan ini harus dibangun dan dimulai sejak proses perencanaan pengawasan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi kepada entitas yang diawasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pengawasan antara lain ialah kualitas proses yang dilaksanakan ketika melakukan pengawasan, apakah pengawasan tersebut dilakukan secara tanggung jawab, cermat dan tepat, sesuai prosedur, dan tetap memperhatikan skeptisme profesional auditor dan tunduk pada kode etik profesi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan.

Laporan hasil pengawasan yang berkualitas harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.

- 1) Tepat waktu merupakan suatu unsur yang menunjukkan laporan hasil pengawasan tersebut berkualitas. Laporan hasil pengawasan harus tepat waktu agar dapat memberikan manfaat secara maksimal. Laporan hasil pengawasan yang penyelesaiannya terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menjadi berkurang nilai manfaatnya bagi

para pengguna.

- 2) Laporan hasil pengawasan harus dibuat secara lengkap sesuai dengan data, informasi, fakta, dan bukti-bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan pengawasan. Selain itu, laporan hasil pengawasan yang lengkap harus dapat memberikan pemahaman yang benar dan memadai serta memberikan informasi dan perspektif yang wajar terkait permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- 3) Akurat berarti temuan dan bukti-bukti yang diperoleh itu disajikan dengan tepat dan benar. Perlunya keakuratan dalam laporan hasil pengawasan ialah untuk dapat memberikan keyakinan kepada pengguna laporan bahwa apa yang telah dilaporkan dapat diandalkan dan memiliki kredibilitas yang memadai. Laporan hasil pengawasan harus memuat seluruh informasi yang didukung dengan bukti yang kompeten, dapat diandalkan, dan relevan dalam kertas kerja pengawasan.
- 4) Objektivitas dalam laporan hasil pengawasan ialah penyajian atas seluruh laporan harus seimbang antara isi dan redaksi. Laporan hasil pengawasan harus disajikan dengan netral dan tidak memihak kepada pihak tertentu atau melebih-lebihkan kecurangan-kecurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- 5) Meyakinkan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh laporan hasil pengawasan. Agar meyakinkan, laporan hasil pengawasan harus dapat menjawab tujuan dan sasaran dari pengawasan, tersajikannya temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang logis sesuai data dan fakta yang ada.

6) Laporan hasil pengawasan harus ditulis dan disusun dengan jelas. Artinya ialah, bahasa yang digunakan dalam penyampaian isi laporan harus dapat dipahami oleh pembaca dan pengguna dari laporan tersebut. Penggunaan bahasa yang jelas, sederhana, lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Apabila terdapat bahasa-bahasa yang teknis ataupun akronim dalam penyusunan laporan hasil pengawasan, auditor harus memberikan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari adanya multitafsir atau salah tafsir dari para pembaca dan pengguna laporan.

7) Laporan yang ringkas adalah laporan yang berisi poin-poin penting terkait hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan yang terlalu terinci akan dapat mempengaruhi kualitas laporan tersebut. Dalam penyusunan laporan hasil pengawasan, auditor harus dapat mengurangi dan menghindari kalimat-kalimat pengulangan dan membingungkan bagi para pembaca. Laporan yang lengkap dan ringkas akan dapat lebih menarik bagi para pembaca laporan.

2.2.3.3 Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri merupakan mandat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3 pada poin (b) yang menyebutkan fungsi BPKP serta sesuai dengan dokumen perjanjian pinjaman luar negeri atau *loan/credit agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *lender*. Dalam setiap dokumen perjanjian

disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Independen yang diakui pihak *lender* dan disebutkan dalam dokumen perjanjian tersebut. Salah satu auditor independen yang dipercaya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Laporan hasil pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri harus disampaikan kepada *lender* secara tepat waktu (pada umumnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir). Keterlambatan dalam penyampaian laporan hasil pengawasan kepada pihak *lender* akan membawa sanksi bagi Pemerintah Republik Indonesia antara lain penundaan atau dibekukannya pencairan dana pinjaman, tertutupnya peluang untuk memperpanjang masa berlakunya pinjaman dan tertutupnya peluang untuk mendapatkan pinjaman baru.

Adapun beberapa kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri dan dimandatkan kepada BPKP untuk dilakukan pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Kegiatan yang Dilakukan Pengawasan

No.	Kegiatan Pengawasan	Lender
1.	Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/ <i>National Slum Upgrading Project (NSUP)</i> <i>Loan IsDB No. IDN-1011</i>	<i>Islamic Development Bank (IsDB)</i>
2.	Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/Pamsimas III (<i>Loan IBRD No. 8578-ID</i>)	<i>World Bank</i>
3.	Verifikasi Pencapaian <i>Disbursement Linked Indicator (DLI)</i> atas Program Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> <i>Loan IBRD No.8884-ID</i>	<i>World Bank</i>
4.	Audit Dukungan atas Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) / <i>Community Based Sanitation Program</i> <i>Loan IsDB Nomor IND-167</i>	<i>Islamic Development Bank (IsDB)</i>

No.	Kegiatan Pengawasan	Lender
5.	Verifikasi Dukungan atas <i>Disbursement Linked Indicators (DLI) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i>	<i>Asian Development Bank (ADB)</i>
6.	Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Inovasi Desa (PID) <i>Loan IBRD 8217-ID</i>	<i>World Bank</i>
7.	Audit Dukungan atas Laporan Keuangan <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i> Kementerian Pertanian <i>Loan IFAD Number 2000001445</i>	<i>International Fund for Agricultural Development (IFAD)</i>
8.	Verifikasi atas <i>Disbursement Link Indicator (DLI) Indoneisa – Supporting Primary Health Care Reform (I SPHERE)</i> <i>Loan IBRD No. 8873-ID</i>	<i>World Bank</i>
9.	Audit atas Laporan Keuangan <i>The Support to Development of The Islamic Higher Education Project</i> <i>Loan IsDB IND-0164</i>	<i>Islamic Development Bank (IsDB)</i>
10.	Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Dana Hibah <i>Global Alliance of Vaccine and Immunization (GAVI)</i>	<i>Global Alliance of Vaccine and Immunization (GAVI)</i>
11	Audit atas Laporan Keuangan pada kegiatan PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)/ <i>Regional Infrastructur For Social Economic (RISE)</i> <i>JICA IP-543</i>	<i>Japan International Cooperation Agency (JICA)</i>

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengawasan

2.2.4.1 Independensi

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern, mendefinisikan independensi sebagai kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas pengawasan intern untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan intern secara objektif. Sedangkan pengertian Independensi sesuai dengan yang ada dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) yaitu “Independensi

adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)". Sedangkan menurut Mulyadi (2002), independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung kepada orang lain. Independensi juga dapat diartikan sebagai kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif serta tidak memihak dalam diri auditor untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

2.2.4.2 Objektivitas

Pusdiklatwas BPKP (2005) Objektivitas didefinisikan sebagai kebebasan seseorang untuk bebas dari pendapat subjektif pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat lebih mengekspresikan pendapat mereka menurut kondisi yang sebenarnya atau apa adanya. Unsur perilaku yang mendukung objektivitas meliputi (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak menjabat sebagai panitia pelelangan, panitia lain dan atau pekerjaan lain yang termasuk dalam tugas operasional objek/entitas yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan standar ataupun kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) bertindak atau membuat keputusan dengan pikiran yang baik, logis, dan sesuai dengan hati nurani

serta akal sehat. Dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern, objektivitas diartikan sebagai suatu sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat.

Menurut Mulyadi (2002), prinsip objektivitas mengharuskan auditor untuk senantiasa bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

2.2.4.3 Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja auditor merupakan sikap auditor yang semakin lama menjadi auditor akan membuat auditor memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi yang relevan, mendeteksi kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan membuat auditor lebih teliti, dapat belajar dari kesalahan yang lalu dan cepat dalam menyelesaikan tugas (Ilat dkk, 2015). Sedangkan menurut Foster dalam Veby Kusuma Wardhani, dkk (2014) pengalaman kerja adalah suatu ukuran waktu atau masa kerja yang telah ditempuh oleh seseorang dalam memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dan telah melaksanakannya dengan baik sesuai aturan yang ada. Adapun indikator pengalaman kerja diantaranya adalah lama waktu seseorang tersebut bekerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta penguasaan terhadap pekerjaan dan tugas serta fungsinya.

2.2.4.4 Kompetensi

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 dijelaskan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Kompetensi adalah salah satu prinsip perilaku yang wajib dipatuhi oleh auditor yaitu dengan melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan, dan kualitas hasil pekerjaan serta menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. Menurut Halim dalam Winda Kurnia, dkk. (2014) menyatakan bahwa standar pertama menuntut kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan pengawasan. Kompetensi ini ditentukan oleh tiga faktor diantaranya adalah pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor, pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman auditor dalam melaksanakan pengawasan, serta pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karir sebagai auditor profesional.

2.2.4.5 Tekanan Waktu

Menurut Sososutikno dalam Rr Putri Arsika Nirmala dan Nur Cahyonowati (2013), tekanan waktu adalah suatu keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi waktu atas rencana waktu yang telah disusun dan ditentukan atau terdapat pembahasan waktu yang sangat ketat dan kaku. Dalam praktiknya tekanan waktu digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan waktu oleh seorang auditor dalam melakukan

pengawasan. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit merupakan komponen penting dalam penilaian kinerja auditor. Menurut Paul dkk dalam Winda Kurnia, dkk (2014), tingginya tekanan waktu yang dialami oleh seorang auditor menyebabkan banyaknya auditor telah beberapa kali melakukan praktik mengurangi kualitas audit (pengawasannya), dan berpotensi serta memiliki implikasi terhadap penurunan kualitas audit (pengawasan). Menurut Muhshyi dalam Winda Kurnia, dkk (2014) tekanan waktu memiliki dua dimensi yaitu tekanan anggaran waktu (situasi yang mengharuskan auditor menjadi lebih efisien terhadap anggaran waktu yang disiapkan, atau memiliki kendala waktu anggaran yang sangat ketat) dan tekanan tenggat waktu (auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat waktu).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Daftar Penelitian sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisa	Hasil Penelitian
1.	Kukuh Haryoko, Grace B. Nangoi, Lintje Kalangi (2017)	Pengaruh Kompetensi, Obyektivitas, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Jenis penelitian Kuantitatif dengan teknis analisis regresi linear berganda	Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas hasil audit. Obyektivitas berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas hasil audit. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas hasil audit.
2.	Rr Putri Arsika Nirmala, Nur Cahyonowati (2013)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, Akuntabilitas, Kompleksitas Audit, Dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor	Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda	Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Due professional care berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisa	Hasil Penelitian
		KAP di Jawa Tengah dan DIY)		audit. Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Kompleksitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Time budget pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.
3.	Winda Kurnia, Khomsiyah, Sofie (2014)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit	Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
4.	Hans Lohonauman, Jullie J. Sondakh, Meily Y. B. Kalalo (2018)	Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Hasil Audit Perwakilan Bpkp Sulawesi Utara	Analisis regresi linear berganda	Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.
5.	Ujianti Tawakkal, Nurhaedah (2019)	Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian ini menunjukan Variabel independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. Indikator yang memberikan kontribusi paling besar terhadap terbentuknya kualitas audit adalah hasil temuan audit yang akurat.

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisa	Hasil Penelitian
6.	Metha Kartika Carolita, Shiddiq Nur Rahardjo (2012)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Hasil Audit. (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Semarang)	Analisis regresi linear berganda	<p>Pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Artinya pengalaman kerja yang lebih besar secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hasil audit laporan keuangan.</p> <p>Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Artinya independensi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil audit.</p> <p>Objektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Artinya tingkat objektivitas yang lebih tinggi secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hasil audit laporan keuangan.</p> <p>Integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Artinya tingkat integritas yang lebih tinggi secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hasil audit laporan keuangan.</p> <p>Kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas. Artinya kompetensi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil audit.</p> <p>Komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Artinya tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hasil audit laporan keuangan.</p>

Sumber : Data diolah oleh Penulis (2022)

2.3 Kerangka Konseptual

Pengawasan intern dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan sangat diperlukan untuk mendorong tercipta dan terwujudnya *clean goverment* dan *good governance* dan dalam rangka didukungnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bersih serta bebas dari praktik-praktik yang menyebabkan penyimpangan dan penyelewangan wewenang dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kualitas pengawasan yang dilakukan BPKP harus dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kepercayaan dari para *stakeholder* seperti masyarakat dan pemberi pinjaman/*lender* serta dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai atas kegiatan maupun program yang dilaksanakan serta memastikannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menghasilkan kualitas hasil pengawasan yang baik, diperlukan sumber daya auditor yang independen, kompeten, dan berpengalaman dalam melakukan pengawasan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola kegiatan dan program yang dananya bersumber dari pinjaman.

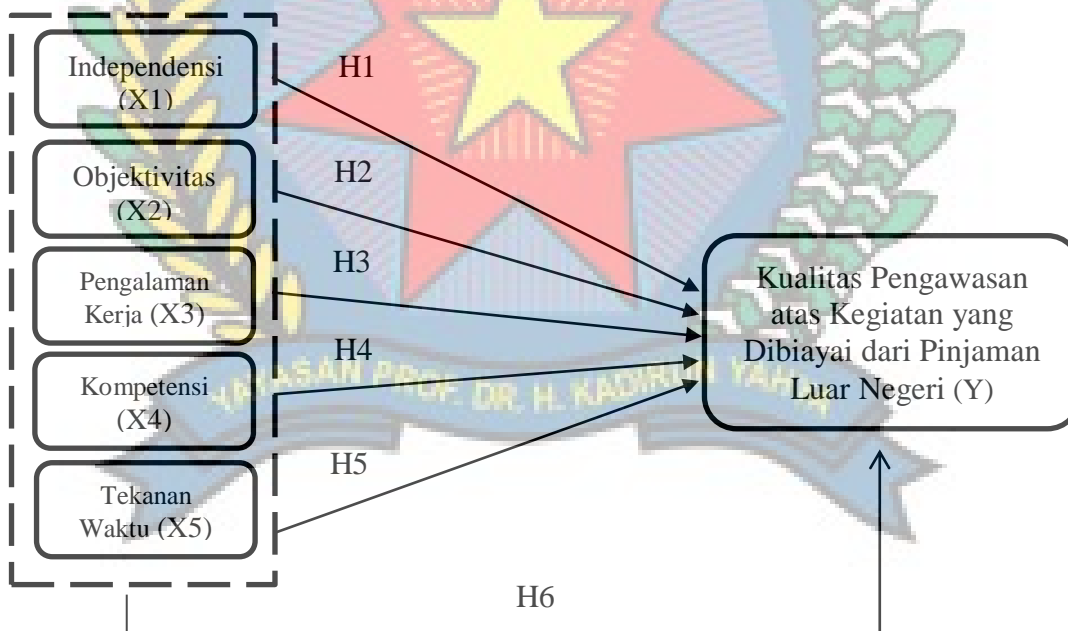
Teori keagenan atau *agency theory* menjelaskan tentang hubungan yang timbul karena adanya suatu kontrak atau perikatan yang telah ditetapkan oleh dua pihak, yaitu *principal* yang disebut pihak yang mendelegasikan pekerjaan dan *agent* yaitu pihak yang menerima pendelegasian pekerjaan tersebut. Peran BPKP sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan (BPKP) merupakan *agent* yang diberi tanggung jawab oleh *principal* yaitu *stakeholders* seperti presiden, masyarakat, dan pihak pemberi pinjaman (*lender*) untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menjelaskan alasan tindakan orang lain atau dirinya sendiri, yang akan tergantung pada faktor internal seperti

sifat, kepribadian, sikap atau faktor eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Hasil penelitian dari Kukuh Haryoko, dkk (2017), Rr Putri Arsika Nirmala, Nur Cahyonowati (2013), dan Winda Kurnia, Khomsiyah, Sofie (2014), menunjukkan bahwa independensi, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, dan tekanan waktu berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil audit. Dalam hubungannya seperti pada uraian diatas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Independensi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

H2: Objektivitas berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

H3: Pengalaman Kerja berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

H4: Kompetensi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

H5: Tekanan Waktu berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

H6: Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu secara simultan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan cara, metode, ataupun kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai dengan kesimpulan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dalam Sugiyono (2019) dijelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif dilaksanakan untuk menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (untuk meramalkan suatu gejala). Instrumen (alat pengumpul data) yang digunakan dalam penelitian kuantitatif akan menghasilkan data berupa angka (numerikal). Dalam penelitian kuantitatif diperlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang akan digunakan. Dengan demikian kesimpulan hasil uji hipotesis yang diperoleh melalui penelitian kuantitatif dapat diberlakukan secara umum.

Tujuan penelitian ini adalah menguji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganalisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen (Ghozali, 2013). Data yang digunakan untuk menganalisis dan menguji hipotesis yang ada diperoleh secara langsung (data primer) dari penyebaran kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria yang ada (*pusposive sampling*). Adapun unit analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat individu diantaranya perilaku, sikap, dan perbuatan dari auditor internal pemerintah secara individu yang melakukan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi satu tahap (*cross-sectional study*) yaitu data yang dikumpulkan hanya satu kali dalam periode hari, minggu, ataupun bulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner penelitian. Penelitian ini menggunakan skala *likert* (*likert scale*) sebagai skala pengukuran. Menurut Sugiyono (2019) “skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Km 5,5, Kota Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan rencana waktu pelaksanaan

penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

No.	Kegiatan	Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal/Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Seminar Proposal																								
4	Perbaikan/Acc Proposal																								
5	Riset																								
6	Pengolahan Data																								
7	Penyusunan Laporan Penelitian																								
8	Bimbingan Skripsi																								
9	Sidang Meja Hijau																								

Sumber : Diolah oleh Penulis (2022)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa populasi adalah: “Wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”. Populasi juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang, kejadian, dan segala sesuatu yang menjadi sasaran objek yang sedang diteliti dan memiliki karakteristik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 143 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2019) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Metode pemilihan sampel yang digunakan yaitu *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2019) mendefinisikan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam.

Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan Jabatan Fungsional Auditor.
2. Pernah ikut serta dalam tim pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri pada kurun waktu 5 tahun terakhir (2018 s.d 2022).
3. Memiliki peran sebagai anggota tim/ketua tim/pengendali teknis di dalam surat tugas pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka diperoleh sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 58 orang, dengan uraian sebagai berikut:

Kriteria Sampel	Jumlah Sampel (Orang)
Jumlah auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	143
Pengurangan Sampel Kriteria 1: Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan Jabatan Fungsional Auditor	(18)
Pengurangan Sampel Kriteria 2: Pernah ikut serta dalam tim pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri pada kurun waktu 5 tahun terakhir (2018 s.d 2022)	(65)

Kriteria Sampel	Jumlah Sampel (Orang)
Pengurangan Sampel Kriteria 3: Memiliki peran sebagai anggota tim/ketua tim/pengendali teknis di dalam surat tugas pengawasan	(2)
Total Sampel	58

3.3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, kuesioner, atau Angket dan jejak pendapat dari individu atau kelompok serta hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (Sugiyono, 2016). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai dan skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari auditor yang telah menerima dan menjawab seluruh pernyataan dalam kuisisioner/angket.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen juga sering disebut dengan variabel output, kriteria, dan konsekuen. Pengertian variabel dependen (terikat) menurut

Sugiyono (2019) “Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti adalah kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen juga sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent. Pengertian variabel independen (bebas) menurut Sugiyono (2016) “Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu bagi auditor dalam melakukan pengawasan.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Menurut Sugiyono (2013), definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 3.4 Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Independensi (X1)	Pengertian Independensi sesuai dengan yang ada dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) yaitu “Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan objek pengawasan 2. Independensi Pelaksanaan pengawasan 3. Independensi pelaporan <p><i>Sumber:</i> Lukman Harahap (2015), Yenny dk k. (2012).</p>	Skala Likert

Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator	Skala
	<p>tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (<i>independence of mind</i>) dan independensi dalam penampilan (<i>independence in appearance</i>)". Sedangkan menurut Mulyadi (2002), independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung kepada orang lain. Independensi juga dapat diartikan sebagai kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif serta tidak memihak dalam diri auditor untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya.</p>	<p>Nugraha Agung E.P (2012)</p>	
<p>Objektivitas (X2)</p>	<p>Objektivitas diartikan sebagai suatu sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Menurut Mulyadi (2002), prinsip objektivitas mengharuskan auditor untuk senantiasa bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas dari benturan kepentingan 2. Pengungkapan kondisi sesuai fakta <p>Sumber: Lukman Harahap (2015), Yenny dk k. (2012), Nugraha Agung E.P (2012)</p>	<p>Skala Likert</p>
<p>Pengalaman Kerja (X3)</p>	<p>Pengalaman kerja auditor merupakan sikap auditor yang semakin lama menjadi auditor akan membuat auditor memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi yang relevan, mendeteksi kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lamanya auditor bekerja 2. Banyaknya penugasan yang ditangani. <p>Sumber: Lukman Harahap (2015), Yenny dk k. (2012), Nugraha Agung E.P (2012)</p>	<p>Skala Likert</p>

Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator	Skala
	Banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan membuat auditor lebih teliti, dapat belajar dari kesalahan yang lalu dan cepat dalam menyelesaikan tugas (Ilal dkk, 2015)		
Kompetensi (X4)	Menurut Halim dalam Winda Kurnia, dkk. (2014) menyatakan bahwa standar pertama menuntut kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan pengawasan. Kompetensi ini ditentukan oleh tiga faktor diantaranya adalah pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor, pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman auditor dalam melaksanakan pengawasan, serta pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karir sebagai auditor profesional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan standar akuntansi dan auditing. 2. Pengetahuan Umum 3. Keahlian Khusus 4. Mutu Personal <p>Sumber: Lukman Harahap (2015), Yenny dk k. (2012), Nugraha Agung E.P (2012)</p>	Skala Likert
Tekanan Waktu (X5)	Menurut Sososutikno dalam Rr Putri Arsika Nirmala dan Nur Cahyonowati (2013), tekanan waktu adalah suatu keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi waktu atas rencana waktu yang telah disusun dan ditentukan atau terdapat pembahasan waktu yang sangat ketat dan kaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap auditor memanfaatkan waktu 2. Sikap auditor dalam penurunan kualitas audit <p>Sumber: Lukman Harahap (2015), Yenny dk k. (2012), Nugraha Agung E.P (2012)</p>	Skala Likert
Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Y)	Dalam (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008) dijelaskan bahwa Pengawasan yang berkualitas harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk tercapainya tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Kualitas pengawasan ini harus dibangun dan dimulai sejak proses perencanaan pengawasan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi kepada entitas yang diawasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pengawasan antara lain ialah kualitas proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap sistem informasi klien. 2. Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan pekerjaan lapangan. 3. Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien. 4. Sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. 5. Melaporkan semua kesalahan klien. 6. Kesesuaian pengawasan dengan standar dan norma yang berlaku 	Skala Likert

Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator	Skala
	<p>yang dilaksanakan ketika melakukan pengawasan, apakah pengawasan tersebut dilakukan secara tanggung jawab, cerman dan tepat, sesuai prosedur, dan tetap memperhatikan skeptisme profesional auditor dan tunduk pada kode etik profesi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan.</p> <p>Adapun kualitas pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kualitas pengawasan berupa audit yang dilaksanakan oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas kegiatan maupun program yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.</p>	<p>Sumber: Lukman Harahap (2015), Yenny dk k. (2012), Nugraha Agung E.P (2012)</p>	

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode survey (*survey method*), yaitu dengan menyebarkan kuisisioner yang berisi pernyataan yang akan diisi dan dijawab oleh responden auditor yang telah ditentukan (*purposive sampling*). Proses penyebaran kuisisioner dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner dalam penelitian ini berisi pernyataan mengenai Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu bagi auditor sebagai variabel independen dan Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri sebagai variabel dependen.

Cara pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan prosedur:

1. Observasi
2. Kuesioer
3. Wawancara
4. Studi Pustaka

Pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dibuat dengan menggunakan skala Likert untuk dijawab oleh responden yaitu :

- a. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi nilai = 1
- b. Untuk jawaban tidak setuju diberi nilai = 2
- c. Untuk jawaban netral diberi nilai = 3
- d. Untuk jawaban setuju diberi nilai = 4
- e. Untuk jawaban sangat setuju diberi nilai = 5

Total pernyataan pada kuesioner penelitian ini yang akan dijawab oleh responden adalah sebanyak 68 pernyataan, dengan rincian sebagai berikut:

Variabel (X)

- a. Independensi (X1) : 10 Pernyataan
- b. Objektivitas (X2) : 7 Pernyataan
- c. Pengalaman Kerja (X3) : 6 Pernyataan
- d. Kompetensi (X4) : 10 Pernyataan
- e. Tekanan Waktu (X5) : 6 Pernyataan

Variabel (Y)

- Kualitas Pengawasan (Y) : 12 Pernyataan

3.6 Teknik Analisa Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen yang baik ialah instrumen yang valid dan reliabel. Uji validitas dan uji realibilitas adalah pengujian kualitas data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pengujian pengukuran tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data

yang dikumpulkan. Pengujian validitas dan realibilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan program *IBM SPSS Statistics 20 (Statistical Package for the Social Sciences)*.

a. Uji Validitas

Validitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen betul-betul mengukur apa yang perlu diukur. Uji validitas item digunakan untuk mengetahui seberapa cermat sebuah item dalam mengukur objek yang sedang diukur. Item tersebut biasanya pernyataan atau pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang akan dijawab oleh responden. Selanjutnya untuk pengambilan keputusan dan mengetahui instrumen pernyataan dalam kuisisioner tersebut valid atau tidak ialah menggunakan nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r hitung harus berada diatas 0.3. Hal ini dikarenakan jika nilai r hitung lebih kecil dari 0.3, berarti item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item-item pertanyaan lainnya dari pada variabel yang diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid. Dalam mencari nilai korelasi, maka penulis menggunakan rumus *Pearson Product Moment* dengan bantuan *IBM SPSS Statistics 20 (Statistical Package for the Social Sciences)*.

b. Uji Realibilitas

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan. Instrument yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Jika koefisien korelasi 0,70 atau lebih maka dapat dikatakan instrumen

tersebut reliable dan memberikan tingkat reliabel yang cukup tinggi, namun sebaliknya apabila nilai realibilitas instrumen dibawah 0,70 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Model penelitian sebaiknya diuji terlebih dahulu asumsi klasiknya untuk memastikan tidak adanya bias atau rancu yang dapat membuat hasil penelitian menjadi tidak akurat (Sunjoyo dkk, 2013).

a. Uji Normalitas

Menurut Sunyoto (2016) uji normalitas adalah “di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali”.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terkait untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Dasar dalam pengambilan keputusan dalam Uji Normalitas:

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu (Sunjoyo dkk, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, jika diantara variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- 2) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF), nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali dalam Ayuningtyas (2012) menjelaskan uji heteroskedastisitas bahwa “uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Pengujian heteroskedasitas berupa grafik scatterplot. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, tidak heterokedastitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Dyah Nirmala A.J (2012) regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Dalam model ini diasumsikan adanya hubungan satu garis lurus (linear) antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Maka dari itu, regresi linear berganda dapat dirumuskan dalam suatu bentuk fungsi tertentu antara variabel dependen (y) dengan variabel independen (x) atau

dapat dinyatakan dalam suatu bentuk persamaan $y=f(x)$.

Pada penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu) terhadap variabel dependen (kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri), dengan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$KP = a + b_1In + b_2Ob + b_3PK + b_4Ko + b_5TK + e$$

Keterangan:

KP = Kualitas Pengawasan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

In = Independensi

Ob = Objektivitas

PK = Pengalaman Kerja

Ko = Kompetensi

TW = Tekanan Waktu

e = Error

3.6.4 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian. Dalam penelitian ini, uji hipotesis akan diuji menggunakan analisis regresi linear, yaitu analisis yang akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu sebagai variable independen

terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri sebagai variabel dependen. Dalam rangka menguji hipotesis mengenai Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu auditor secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan, digunakan pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t dan secara simultan dengan uji F.

a. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali dalam Salsabila (2011) menjelaskan tentang uji t, yaitu: uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Ashari (2011) menambahkan mengenai pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, yaitu menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$, Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.

$H_a: \beta \neq 0$, Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.

Untuk mencari t-tabel dengan $df = N - 2$, taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan t-tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak,
- b. Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Jika *p-value* $<$ 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak,
- b. Jika probabilitas $<$ tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

b. Uji Simultan (Uji F)

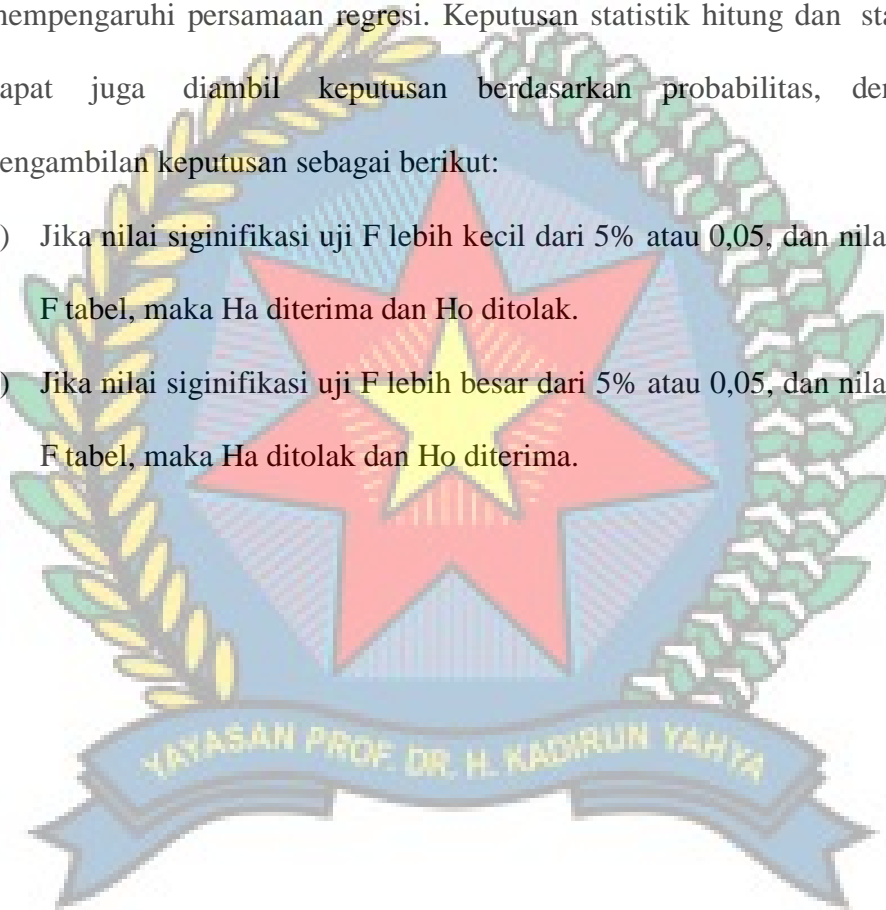
Ghozali dalam Salsabila (2011) menjelaskan tentang uji F, yaitu: uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji. Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Ashari (2011) mengenai uji F menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$, Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.

$H_a: \beta \neq 0$, Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.

Dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5%, pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji semua sub variabel bebas yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% atau 0,05, dan nilai F hitung > F tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- 2) Jika nilai signifikansi uji F lebih besar dari 5% atau 0,05, dan nilai F hitung < F tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Instansi

Sejarah berdirinya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimulai pada tahun 1936 dengan berdirinya Djawatan Akuntan Negara/DAN (Regering Accountants dienst). Badan tersebut ditugaskan untuk menyelidiki pembukuan berbagai perusahaan milik negara dan lembaga-lembaga tertentu. Secara struktural, DAN yang bertanggung jawab mengawasi pengelolaan BUMN melapor kepada Thesauri Jenderal Kementerian Keuangan. Keputusan Presiden No. 239 Tahun 1966 menetapkan Direktorat Jenderal Pengawasan Fiskal (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tanggung jawab DDPKN (kemudian dikenal sebagai DJPKN) mencakup pemantauan anggaran dan pemantauan unit bisnis/layanan. Ini pada awalnya merupakan tanggung jawab DAN dan Thesauri General. Dengan dikeluarkannya Keppres No. 31 Tahun 1983 pada tanggal 30 Mei 1983, DJPKN diubah menjadi BPKP. Ini adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah perlunya suatu kewenangan atau lembaga pengawasan yang bebas menjalankan fungsinya tanpa menemui kemungkinan hambatan dari lembaga negara yang diperiksa atau yang menjadi objek pengawasannya. Pada tahun 2001,

diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Kewajiban, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Sektoral, dan terakhir diubah beberapa kali dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Pendekatan yang dilakukan BPKP lebih preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif.

Selama masa reformasi ini, BPKP banyak mengadakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah dan kementerian sebagai mitra kerja BPKP. MoU biasanya membantu mitra meningkatkan kinerja dan mencapai tata kelola yang baik. Pada tahun 2006, BPKP melakukan relokasi dan aktivasi fungsi kedua. Setelah relokasi dan aktivasi BPKP, visi, misi dan strategi menjadi jelas. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Sejak akhir 2014 hingga awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP melapor kepada Presiden tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta bertanggung jawab langsung kepada presiden atas seluruh tugas dan fungsi yang dilaksanakan di bidang pengawasan. Selain itu, Presiden juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah.

BPKP terus melakukan transformasi menuju perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan agar senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders*. Adapun visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi BPKP terdiri dari:

- 1) Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
- 2) Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

4.1.2 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural Eselon II A) yang dibantu oleh:

- Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)
- Korwas Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3 APIP)

- Korwas Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
- Korwas Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- Korwas Bidang Akuntan Negara
- Korwas Bidang Investigasi
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), dibantu satu Kepala Subbagian dan 2 Subkoordinator yaitu:

- Kepala Subbagian Umum
- Subkoordinator Keuangan
- Subkoordinator Kepegawaian

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Data diperoleh dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Adapun tanggung jawab dan pembagian tugas dari masing-masing

bidang atau bagian dalam struktur organisasi sesuai dengan fungsinya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1) Kepala Perwakilan

Perwakilan BPKP di masing-masing ibukota provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

2) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha sebagai unit pendukung dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Bagian Tata Usaha memiliki tugas pokok diantaranya adalah melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam perlengkapan rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan.

Andil yang cukup besar diberikan Bagian Tata Usaha bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara serta mempunyai peran yang sama pentingnya dengan bidang-bidang lain di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Adapun produk jasa layanan yang dilakukan oleh Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif yang berkaitan dengan pengawasan.
- b) Menyelenggarakan Diklat Sertifikasi dan Pembinaan Jabatan

Fungsional Auditor.

- c) Pengembangan Sistem Pengolahan Data Kepegawaian (Sispedap).
- d) Pengolahan Data Hasil Pengawasan (Aplikasi SIM-HP).
- e) Perbantuan Pengelolaan Kearsipan baik yang berkaitan dengan hasil pengawasan maupun yang berkaitan dengan non-pengawasan.
- f) Perbantuan Penyusunan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
- g) Pembinaan Dalam Penertiban Pembukuan Aset Negara.
- h) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi.

3) Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3 APIP)

Bidang P3 APIP memiliki tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengelola, melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pengawasan, penyiapan bahan laporan realisasi kegiatan pengawasan, penyusunan laporan berkala atas hasil-hasil pengawasan serta program pembinaan APIP termasuk pembinaan jabatan fungsional auditor/JFA di lingkungan Perwakilan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah.

Adapun produk jasa layanan yang dilakukan oleh bidang P3 APIP diantaranya:

- a) Menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif, baik yang berkaitan dengan pengawasan maupun non pengawasan.
- b) Menyelenggarakan Diklat Sertifikasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.
- c) Pengolahan Data Hasil Pengawasan (Aplikasi SIM-HP) maupun

melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA).

d) Pembinaan dan Peningkatan Tata Kelola APIP

4) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negaran dan pembangunan nasional pada instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pengawasan dilakukan atas pelaksanaan kegiatan maupun pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik rupiah murni maupun yang bersumber dari pinjaman/*loan* ataupun pembiayaan dalam/luar negeri.

Adapun produk jasa layanan yang dapat diberikan dalam bentuk audit maupun bentuk pengawasan lainnya oleh Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara antara lain berupa:

- a) Audit atas laporan keuangan dari berbagai instansi vertikal pemerintah pusat.
- b) Audit operasional atas program dan kegiatan instansi vertikal pemerintah pusat tertentu.
- c) Audit Kinerja atas suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal pemerintah pusat.
- d) Audit atas pengadaan barang dan jasa oleh Instansi vertikal Pemerintah Pusat
- e) Audit untuk tujuan tertentu baik yang bersifat *mandatory* ataupun atas

dasar permintaan dari instansi vertikal pemerintah pusat.

- f) Evaluasi atas berbagai kebijakan program dan kegiatan tertentu.
- g) Perumusan Sistem Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*) pada berbagai Instansi Pemerintah maupun pada Perguruan Tinggi (*Good University Governance*).
- h) Reviu berbagai kegiatan, program, dan pekerjaan pembangunan termasuk verifikasi atas tunggakan pembayaran atas pekerjaan yang melewati tahun anggaran pelaksanaannya.
- i) Melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap instansi vertikal pemerintah pusat.
- j) Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan yang dibiayai dari utang negara / pembiayaan negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

5) Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang merupakan perpanjangan tugas Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah melaksanakan kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan keuangan daerah dengan kegiatan pengawasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a) Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah.
- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap

akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah.

- c) Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah.
- d) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah.
- e) Pengawasan intern terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
- f) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah.
- g) Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah.
- h) Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah.
- i) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- j) Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang APD menyelenggarakan fungsi *assurance* (audit, evaluasi, reviu, dan monitoring) dan *consulting*. Fungsi Consulting diantaranya pemberian konsultasi/pendampingan terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.

6) Bidang Akuntan Negara

Dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN/D Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan dan memberikan pelayanan / jasa berupa:

- a) Sosialisasi GCG.
- b) Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi GCG.
- c) Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi *Key Performance Indicators* (KPI).
- d) Asistensi /Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Resiko.
- e) Asistensi /Bimbingan Teknis Implementasi Pengendalian Intern Perusahaan.
- f) Asistensi /Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Teknologi Informasi.
- g) Asistensi /Bimbingan Teknis Implementasi Asset Manajemen, SIA PDAM dan Penyusunan *Corporate Plan*.
- h) Asistensi /Bimbingan Teknis Manual Akuntansi.
- i) Asistensi /Bimbingan Teknis Persipan BLUD.
- j) Asistensi/ Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
- k) Asistensi /Bimbingan Teknis Jasa Manajemen Lainnya.
- l) Kegiatan *Assurance* seperti audit dan reviu dan kegiatan lainnya.

7) Bidang Investigasi

Bidang investigasi mempunyai tugas di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk di dalamnya melakukan pengawasan yang bersifat lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian

harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara, audit perhitungan kerugian negaran, dan pemberian keterangan ahli.

Adapun kegiatan bidang Investigasi yang bersifat pendeteksian, pengungkapan, serta penindakan kejadian berindikasi KKN antara lain melalui :

- a) Audit Investigatif terhadap kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi yang berasal dari pengembangan audit reguler, tindak lanjut dari pengaduan masyarakat, permintaan instansi penyidik (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dan permintaan instansi lainnya seperti pemerintah daerah maupun instansi vertikal pemerintah pusat.
- b) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka membantu instansi penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan).
- c) Penugasan perbantuan melalui pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan dan perbantuan tenaga auditor kepada instansi penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan).
- d) Melakukan sosialisasi guna untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi, antara lain melalui sosialisasi program anti korupsi kepada kelompok masyarakat tertentu secara sistematis.
- e) Pengembangan sistem pengendalian intern yang dirancang khusus untuk mencegah korupsi..
- f) Evaluasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan.

4.1.3 Deskripsi Data

Penelitian tentang Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman

Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara) dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Km 5,5 Medan. Penelitian ini dilaksanakan pada kurun waktu Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Adapun keseluruhan auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 143 orang. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan berkaitan dengan setiap variabel dalam penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan pada rentang 28 Maret 2022 sampai dengan 29 April 2022.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, kuesioner yang dibagikan sebanyak 58 eksemplar kepada responden yang bersedia menjawab dan mengisi setiap pernyataan di dalam kuesioner yang diberikan. Adapun rincian pendistribusian kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner

Uraian	Jumlah Kuesioner	Persentase
Distribusi Kuesioner	58	100,00%
Kuesioner Kembali	58	100,00%
Kuesioner yang dapat diolah	58	100,00%

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

4.1.4 Karakteristik Responden

1) Jenis Kelamin

Berikut ini disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis

kelamin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase
Laki-laki	42	72,41%
Perempuan	16	27,59%
Jumlah	58	100,00%

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

Tabel 4.2 menyajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa dari total 58 orang responden terdapat responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang atau 72,41% dari total responden, sementara jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang atau 27,59% dari total responden.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai jabatan fungsional auditor berjenis kelamin laki-laki.

2) Usia

Berikut ini disajikan karakteristik responden berdasarkan usia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase
Dibawah 20 Tahun	0	0,00%
21 s.d 30 Tahun	6	10,34%
31 s.d 40 Tahun	30	51,72%
41 s.d 50 Tahun	2	3,45%
51 s.d 60 Tahun	20	34,48%
Jumlah	58	100,00%

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

Tabel 4.3 menyajikan data sebaran karakteristik responden berdasarkan usia. Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa dari total responden sebanyak 58 orang yang dijadikan sampel, terdapat sebanyak 0 (nol) orang yang berusia dibawah 20 tahun, sebanyak 6 (enam) orang yang berusia 21 s.d 30 tahun atau 10,34% dari total responden, sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang berusia 31 s.d 40 tahun atau 51,72% dari total responden, sebanyak 2 (dua) orang yang berusia 41 s.d 50 tahun atau 3,45% dari total responden, dan sebanyak 20 (dua puluh) orang yang berusia 51 s.d 60 tahun atau 34,48% dari total responden.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai jabatan fungsional auditor dengan usia 31 s.d 40 tahun yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang responden.

3) Pendidikan

Berikut ini disajikan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)	Persentase
SMA / Sederajat	0	0,00%
Diploma / Sarjana Muda (D3)	9	15,52%
Sarjana (S1)	46	79,31%
Magister (S2)	3	5,17%
Jumlah	58	100,00%

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

Tabel 4.4 menyajikan data sebaran karakteristik responden

berdasarkan pendidikan terakhir. Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa dari total responden sebanyak 58 orang yang dijadikan sampel, terdapat sebanyak 0 (nol) orang yang pendidikan terakhirnya SMA / Sederajat atau 0,00% dari total responden, sebanyak 9 (sembilan) orang yang pendidikan terakhirnya Diploma / Sarjana Muda (D3) atau 15,52% dari total responden, sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang pendidikan terakhirnya Sarjana (S1) atau 79,31% dari total responden, dan sebanyak 3 (tiga) orang yang pendidikan terakhir Magister (S2) atau 5,17% dari total responden.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai jabatan fungsional auditor dengan tingkat pendidikan terakhirnya adalah Sarjana (S1) yaitu sebanyak 46 (empat puluh enam) orang responden atau 79,31% dari total responden.

4) Masa Kerja

Berikut ini disajikan karakteristik responden berdasarkan masa kerja/ pengalaman sebagai auditor, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja / Pengalaman sebagai Auditor	Frekuensi (orang)	Persentase
Dibawah 5 Tahun	5	8,62%
5 s.d 10 Tahun	20	34,48%
11 s.d 15 Tahun	11	18,97%
16 s.d 20 Tahun	0	0,00%

Masa Kerja / Pengalaman sebagai Auditor	Frekuensi (orang)	Persentase
Lebih dari 20 Tahun	23	37,93%
Jumlah	58	100,00%

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

Tabel 4.5 menyajikan data sebaran karakteristik responden berdasarkan masa kerja atau pengalaman sebagai seorang auditor.

Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa dari total responden sebanyak 58 orang yang dijadikan sampel, terdapat sebanyak 5 (lima) orang yang memiliki masa kerja dibawah 5 tahun atau 8,62% dari total responden, sebanyak 20 (dua puluh) orang yang memiliki masa kerja 5 s.d 10 tahun atau 34,48% dari total responden, sebanyak 11 (sebelas) orang yang memiliki masa kerja 11 s.d 15 tahun atau 18,97% dari total responden, sebanyak 0 (nol) orang yang memiliki masa kerja 16 s.d 20 tahun atau 0,00% dari total responden, dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun atau 37,93% dari total responden.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai jabatan fungsional auditor dengan masa kerja atau pengalaman sebagai auditor lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang responden atau 37,93% dari total responden.

4.1.5 Analisis dan Evaluasi

4.1.5.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan dan pengujian data kuesioner

yang telah dijawab oleh responden, diperoleh hasil dari masing-masing pengujian atas variabel penelitian. Adapun cara untuk mencari nilai validitas dari sebuah item adalah dengan mengkorelasikan skor item tersebut dengan total skor item-item dari variabel tersebut, apabila nilai korelasi diatas 0,3 maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat kevalidan yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0,3 maka dikatakan item tersebut kurang valid. Metode korelasi yang digunakan adalah *Pearson Product Moment*. Validitas suatu butir pernyataan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada tabel dengan judul *Item-Total Statistic*. Menilai kevalidan masing-masing butir pernyataan dapat dilihat dari nilai *Corrected item-Total Correlation* masing-masing butir pernyataan. Suatu butir pernyataan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected item-Total Correlation* $> 0,30$. Sugiyono, (2013).

Hasil pengolahan data dan pengujian atas variabel-variabel tersebut telah dilakukan peneliti dengan menggunakan bantuan program *IBM SPSS Statistics 20 (Statistical Package for the Social Sciences)*, dengan uraian sebagai berikut:

1) Variabel Independensi (X1)

Berikut disajikan data hasil pengolahan dari aplikasi SPSS untuk variabel independensi (X1), dengan uraian sebagai berikut:

X1.10	Pearson Correlation	.201	.415**	.258	.528**	.177	.481**	.272*	.593**	.444**	1	.727**
	Sig. (2-tailed)	.130	.001	.050	.000	.184	.000	.039	.000	.000		.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Total_X1	Pearson Correlation	.425**	.612**	.589**	.703**	.421**	.573**	.557**	.598**	.682**	.727**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Adapun kesimpulan hasil pengolahan data dari aplikasi SPSS untuk variabel independensi (X1), adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Independensi (X1)

No.	Pernyataan	Corrected item- Total Correlation / Koefisien Korelasi	r-tabel	Keterangan
1.	Auditor harus jujur dan tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.	0,425	0,300	Valid
2.	Auditor harus mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakainya sebagai dasar pengungkapan pendapat.	0,612	0,300	Valid
3.	Auditor harus mengesampingkan masalah hubungan keluarga maupun hubungan kedekatan lainnya dengan klien (objek pengawasan) dalam mengaudit, guna menjaga independensinya dalam penampilan (<i>independence in appearance</i>).	0,589	0,300	Valid
4.	Auditor harus menghindari hubungan secara personal yang berlebihan terhadap klien (objek pengawasan) demi kepentingan pengawasan agar independen dalam penampilannya tetap terjaga.	0,703	0,300	Valid
5.	Penyusunan program pengawasan bebas dari intervensi pimpinan tentang prosedur yang dibuat auditor.	0,421	0,300	Valid
6.	Penyusunan program pengawasan bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subjek pengawasan	0,573	0,300	Valid

	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.058	.001	.703		.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58
	Pearson Correlation	.481**	.437**	.736**	.217	.053	.590**	1	.727**
X2.7	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.101	.693	.000		.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58
	Pearson Correlation	.723**	.800**	.687**	.688**	.336**	.693**	.727**	1
Total_	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.010	.000	.000	
X2	N	58	58	58	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Adapun kesimpulan hasil pengolahan data dari aplikasi SPSS untuk variabel objektivitas (X2), adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Objektivitas (X2)

No.	Pernyataan	Corrected item- Total Correlation / Koefisien Korelasi	r-tabel	Keterangan
1.	Auditor mengungkapkan temuan dan permasalahan berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya yang ada dilapangan.	0,723	0,300	Valid
2.	Auditor harus bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil pengawasan.	0,800	0,300	Valid
3.	Auditor harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya	0,687	0,300	Valid
4.	Dalam melakukan pengawasan, auditor tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan terhadap objek yang dilakukan pengawasan	0,688	0,300	Valid
5.	Auditor dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi	0,336	0,300	Valid
6.	Auditor harus memiliki sikap penuh tanggung jawab dan berpegang teguh dalam integritas dan melaksanakan tugas dengan nurani akal sehat	0,693	0,300	Valid
7.	Dalam melakukan tindakan atau dalam proses pengambilan keputusan, auditor menggunakan pikiran yang logis dan akal sehat	0,727	0,300	Valid

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

3) Variabel Pengalaman Kerja (X3)

Berikut disajikan data hasil pengolahan dari aplikasi SPSS untuk variabel pengalaman kerja (X3), dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Pengolahan Data SPSS untuk Variabel Pengalaman Kerja (X3)

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.233	.696**	.579**	.581**	.522**	.733**
	Sig. (2-tailed)		.079	.000	.000	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.2	Pearson Correlation	.233	1	.403**	.631**	.301*	.514**	.689**
	Sig. (2-tailed)	.079		.002	.000	.022	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.3	Pearson Correlation	.696**	.403**	1	.650**	.709**	.588**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002		.000	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.4	Pearson Correlation	.579**	.631**	.650**	1	.517**	.719**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.5	Pearson Correlation	.581**	.301*	.709**	.517**	1	.781**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.022	.000	.000		.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.6	Pearson Correlation	.522**	.514**	.588**	.719**	.781**	1	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Total_X3	Pearson Correlation	.733**	.689**	.824**	.874**	.785**	.864**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Adapun kesimpulan hasil pengolahan data dari aplikasi SPSS untuk variabel pengalaman kerja (X3), adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Pengalaman Kerja (X3)

No.	Pernyataan	Corrected item- Total Correlation / Koefisien Korelasi	r-tabel	Keterangan
1.	Semakin lama menjadi auditor, semakin dapat mendeteksi kesalahan dan permasalahan yang dilakukan objek pengawasan.	0,733	0,300	Valid
2.	Semakin banyak jumlah klien/ objek pengawasan yang auditor lakukan pengawasan menjadikan pengawasan yang auditor lakukan semakin lebih baik.	0,689	0,300	Valid
3.	Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sama dengan tahun anggaran yang berbeda dapat memudahkan auditor dalam mendeteksi kesalahan dan kecurangan yang ada di kegiatan tersebut.	0,824	0,300	Valid
4.	Semakin lama menjadi auditor, semakin mudah mencari penyebab munculnya kesalahan serta dapat memberikan rekomendasi untuk menghilangkan/memperkecil penyebab tersebut.	0,874	0,300	Valid
5.	Semakin lama bekerja sebagai auditor, semakin dapat mengetahui informasi yang relevan untuk mengambil pertimbangan dalam membuat keputusan.	0,785	0,300	Valid
6.	Semakin lama menjadi auditor, semakin mengerti bagaimana menghadapi suatu entitas/obyek pengawasan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.	0,864	0,300	Valid

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

4) Variabel Kompetensi (X4)

Berikut disajikan data hasil pengolahan dari aplikasi SPSS untuk variabel kompetensi (X4), dengan uraian sebagai berikut:

X4.10	Pearson	.349**	.568**	.409**	.479**	.492**	.683**	.491**	.774**	.467**	1	.870**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Total_	Pearson	.400**	.682**	.558**	.600**	.674**	.728**	.700**	.801**	.630**	.870**	1
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Adapun kesimpulan hasil pengolahan data dari aplikasi SPSS untuk variabel kompetensi (X4), adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Kompetensi (X4)

No.	Pernyataan	Corrected item- Total Correlation / Koefisien Korelasi	r-tabel	Keterangan
1.	Auditor harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi/audit yang akan membantu dalam mengelola angka dan data.	0,400	0,300	Valid
2.	Auditor harus bisa mengoperasikan sistem atau aplikasi yang sudah dibuat dalam rangka percepatan pelaporan pengawasan.	0,682	0,300	Valid
3.	Auditor harus mampu bekerja secara tim bukan individual.	0,558	0,300	Valid
4.	Auditor harus memiliki pengetahuan secara menyeluruh (kolektif) terkait proses pengawasan dan standar-standar yang sudah ditetapkan	0,600	0,300	Valid
5.	Auditor harus bertanggungjawab untuk menjalani pendidikan guna mempertahankan dan meningkatkan keahlian mereka.	0,674	0,300	Valid
6.	Auditor didorong untuk menunjukkan keahlian mereka dengan mendapatkan sertifikasi profesional setelah mengikuti pendidikan lanjutan.	0,728	0,300	Valid
7.	Auditor harus memiliki kemampuan komunikasi dan analisis yang baik dalam melakukan pengawasan.	0,700	0,300	Valid

No.	Pernyataan	Corrected item- Total Correlation / Koefisien Korelasi	r-tabel	Keterangan
8.	Sebelum melakukan pengawasan, auditor harus mampu memahami dan mengetahui proses bisnis objek yang dilakukan pengawasan.	0,801	0,300	Valid
9.	Auditor harus mampu membuat laporan pengawasan dan menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam pengawasan secara akuntabel dan bertanggung jawab.	0,630	0,300	Valid
10.	Pedoman, TAO (Tentative Audit Objective), dan Petunjuk teknis harus dipahami dan dipelajari oleh seorang auditor sebelum melakukan pengawasan	0,870	0,300	Valid

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

5) Variabel Tekanan Waktu (X5)

Berikut disajikan data hasil pengolahan dari aplikasi SPSS untuk variabel tekanan waktu (X5), dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Pengolahan Data SPSS untuk Variabel Tekanan Waktu (X5)

		Correlations						
		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Total_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	.742**	.365**	.273*	.596**	.522**	.748**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.038	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X5.2	Pearson Correlation	.742**	1	.304*	.418**	.464**	.657**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000		.021	.001	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X5.3	Pearson Correlation	.365**	.304*	1	.828**	.760**	.395**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.005	.021		.000	.000	.002	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X5.4	Pearson Correlation	.273*	.418**	.828**	1	.680**	.642**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.038	.001	.000		.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X5.5	Pearson Correlation	.596**	.464**	.760**	.680**	1	.608**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58

X5.6	Pearson Correlation	.522**	.657**	.395**	.642**	.608**	1	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.000		.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Total_X5	Pearson Correlation	.748**	.770**	.773**	.804**	.863**	.781**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Adapun kesimpulan hasil pengolahan data dari aplikasi SPSS untuk variabel tekanan waktu (X5), adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Tekanan Waktu (X5)

No.	Pernyataan	Corrected item- Total Correlation / Koefisien Korelasi	r-tabel	Keterangan
1.	Jika auditor mampu memanfaatkan waktu pengawasan, maka temuan terkait permasalahan akan lebih maksimal	0,748	0,300	Valid
2.	Pembatasan waktu yang diberikan kepada auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan diperlukan untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas (tepat waktu)	0,770	0,300	Valid
3.	Terbatasnya waktu dalam pengawasan membuat auditor sulit mendeteksi kecurangan dan penyimpangan	0,773	0,300	Valid
4.	Terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan menjadikan auditor memperoleh bukti kurang maksimal	0,804	0,300	Valid
5.	Terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan menjadikan adanya kendala untuk pelaksanaan penyelesaian prosedur pengawasan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.	0,863	0,300	Valid
6.	Auditor berusaha menyelesaikan tugas pengawasan yang dilakukan kepada objek pengawasan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.	0,781	0,300	Valid

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

6) Variabel Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Y)

Berikut disajikan data hasil pengolahan dari aplikasi SPSS untuk variabel Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Y), dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Pengolahan Data SPSS untuk Kualitas Pengawasan (Y)

		Correlations												
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.634"	.783"	.786"	.537"	.441"	.661"	.851"	.660"	.840"	.418"	.804"	.898"
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y2	Pearson Correlation	.634"	1	.532"	.679"	.278"	.711"	.457"	.622"	.408"	.741"	.681"	.431"	.764"
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.035	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.001	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y3	Pearson Correlation	.783"	.532"	1	.556"	.693"	.578"	.345"	.630"	.526"	.615"	.233	.531"	.734"
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.008	.000	.000	.000	.078	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y4	Pearson Correlation	.786"	.679"	.556"	1	.532"	.678"	.749"	.771"	.531"	.831"	.584"	.768"	.906"
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y5	Pearson Correlation	.537"	.278"	.693"	.532"	1	.538"	.589"	.399"	.566"	.388"	.269	.777"	.678"
	Sig. (2-tailed)	.000	.035	.000	.000		.000	.000	.002	.000	.003	.041	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y6	Pearson Correlation	.441"	.711"	.578"	.678"	.538"	1	.434"	.331"	.133	.568"	.446"	.404"	.656"
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000		.001	.011	.321	.000	.000	.002	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y7	Pearson Correlation	.661"	.457"	.345"	.749"	.589"	.434"	1	.637"	.656"	.528"	.609"	.857"	.800"
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.008	.000	.000	.001		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y8	Pearson Correlation	.851"	.622"	.630"	.771"	.399"	.331"	.637"	1	.651"	.719"	.430"	.667"	.829"
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	.011	.000		.000	.000	.001	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y9	Pearson Correlation	.660"	.408"	.526"	.531"	.566"	.133	.656"	.651"	1	.600"	.704"	.691"	.750"
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.321	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y10	Pearson Correlation	.840"	.741"	.615"	.831"	.388"	.568"	.528"	.719"	.600"	1	.658"	.659"	.872"

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
	Pearson Correlation	.418**	.681**	.233	.584**	.269*	.446**	.609**	.430**	.704**	.658**	1	.447**	.686**
Y11	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.078	.000	.041	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	Pearson Correlation	.804**	.431**	.531**	.768**	.777**	.404**	.857**	.667**	.691**	.659**	.447**	1	.852**
Y12	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	Pearson Correlation	.898**	.764**	.734**	.906**	.678**	.656**	.800**	.829**	.750**	.872**	.686**	.852**	1
Total	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
_Y	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : *Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)*

Adapun kesimpulan hasil pengolahan data dari aplikasi SPSS untuk variabel Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Y), adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 Kesimpulan Uji Validitas untuk Variabel Kualitas Pengawasan (Y)

No.	Pernyataan	Corrected item- Total Correlation / Koefisien Korelasi	r-tabel	Keterangan
1.	Salah satu fungsi pengawasan adalah, menilai kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis, mengelola, memantau dan mengurangi resiko yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut	0,898	0,300	Valid
2.	Lingkup penugasan seorang auditor harus mencakup pertimbangan mengenai sistem pencatatan, personalia dan properti fisik yang relevan. Ruang lingkup pengawasan menjadi hal paling Utama ketika auditor melakukan pengawasan agar mendapatkan hasil yang lebih fokus dan terarah sesuai tujuan pengawasan.	0,764	0,300	Valid
3.	Laporan hasil pengawasan yang dihasilkan oleh kegiatan pengawasan yang dilakukan auditor harus tepat waktu, tidak bias dan multitafsir serta	0,734	0,300	Valid

No.	Pernyataan	<i>Corrected item- Total Correlation / Koefisien Korelasi</i>	r-tabel	Keteran gan
	laporan pengawasan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, objektif, meyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal.			
4.	Auditor harus memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dari klien/objek pengawasan guna mendukung proses pengawasan tanpa dihalang-halangi pihak klien.	0,906	0,300	Valid
5.	Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan pengawasan	0,678	0,300	Valid
6.	Auditor harus membuat dokumen audit dalam bentuk kertas kerja audit dan disimpan dengan baik agar dapat diambil secara efektif, dirujuk, dan dianalisis	0,656	0,300	Valid
7.	Dalam pelaksanaan tugas audit, penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tujuan- tujuan tercapai dan kualitas pengawasan terjamin.	0,800	0,300	Valid
8.	Auditor harus menuangkan (mengkomunikasikan) setiap hasil temuannya dilapangan secara cepat dan akurat, serta sesuai fakta untuk digunakan manajemen sebagai bahan koreksi/perbaikan.	0,829	0,300	Valid
9.	Penanggungjawab audit (objek pengawasan) harus mengonfirmasikan dan mengkomunikasikan kemajuan tindak lanjut sebuah temuan/permasalahan secara tertulis kepada auditor dan manajemen	0,750	0,300	Valid
10.	Seorang auditor harus selalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan selama melakukan pengawasan	0,872	0,300	Valid
11.	Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, supervisi, dan pelaporan dalam kegiatan pengawasan merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan auditor dalam suatu tim pengawasan dan pada saat menerima penugasan pengawasan, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi pengawasan, dan tujuan pengawasan.	0,686	0,300	Valid
12.	Laporan harus memuat temuan dan permasalahanserta simpulan hasil	0,852	0,300	Valid

No.	Pernyataan	<i>Corrected item-Total Correlation / Koefisien Korelasi</i>	r-tabel	Keterangan
	pengawasan yang berisi rekomendasi atau saran yang objektif, konstruktif, dan menjadi evaluasi untuk kegiatan selanjutnya dan dalam pelaksanaan pengawasan, program kerja pengawasan menjadi pedoman bagi auditor untuk meyakinkan seluruh pelaksanaan penugasan telah sesuai aturan yang berlaku			

Sumber : Pengolahan Data primer (2022)

4.1.5.2 Hasil Evaluasi Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil evaluasi dalam pengujian analisis deskriptif variabel penelitian dengan melakukan uji validitas sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, maka dapat disimpulkan seluruh pernyataan dalam kuesioner yang diisi oleh responden dapat dikatakan valid. Penilaian kevalidan masing-masing butir pernyataan dapat dilihat dari nilai *Corrected item-Total Correlation* masing-masing butir pernyataan. Suatu butir pernyataan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected item-Total Correlation* $> 0,30$. Sugiyono, (2013). Hasil evaluasi diatas menyatakan seluruh butir pernyataan memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,3.

4.1.5.3 Hasil Uji Reliabilitas Data

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh

pernyataan. Instrument yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Jika koefisien korelasi 0,70 atau lebih maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliable dan memberikan tingkat reliabel yang cukup tinggi, namun sebaliknya apabila nilai realibilitas instrumen dibawah 0,70 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel. Pengujian realibilitas instrumen pernyataan dilakukan dengan *consistency* dengan teknik belah dua (*split half*) yang diuji dengan menggunakan teknik uji reliabilitas yaitu *Cronbach's Alpha* Adapun uraian lebih lanjut terkait hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Nilai Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Independensi (X1)	10	0,769	0,700	Reliabel
Objektivitas (X2)	7	0,762	0,700	Reliabel
Pengalaman Kerja (X3)	6	0,875	0,700	Reliabel
Kompetensi (X4)	10	0,857	0,700	Reliabel
Tekanan Waktu (X5)	6	0,869	0,700	Reliabel
Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Y)	12	0,945	0,700	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Dari tabel hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai standar reliabilitas yaitu 0,700 sehingga dapat disimpulkan instrument atau kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independensi, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, tekanan waktu

terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dinyatakan dapat diandalkan/reliabel sebagai alat ukur variabel.

4.1.5.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terkait untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Dasar dalam pengambilan keputusan dalam Uji Normalitas diantaranya adalah:

- a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
- b) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Berikut ini disajikan hasil pengujian normalitas menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.19710213
	Absolute	.089
Most Extreme Differences	Positive	.066
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.677
Asymp. Sig. (2-tailed)		.749

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas data pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi $0,749 > 0,05$. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal dan model regresi tersebut sudah layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri berdasarkan masukan variabel independen yaitu independensi, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, dan tekanan waktu.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Jika nilai

Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, dan nilai Toleransi tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 0$ maka $Tolerance = 1/10$ atau 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance. Berikut ini hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	-6.214	4.477				
Total_X1	.025	.160	.017	.158	.875	.318	3.140
Total_X2	.984	.219	.479	4.483	.000	.319	3.134
Total_X3	.062	.125	.037	.500	.619	.649	1.542
Total_X4	.299	.160	.227	1.869	.067	.247	4.051
Total_X5	.517	.120	.360	4.292	.000	.518	1.932

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

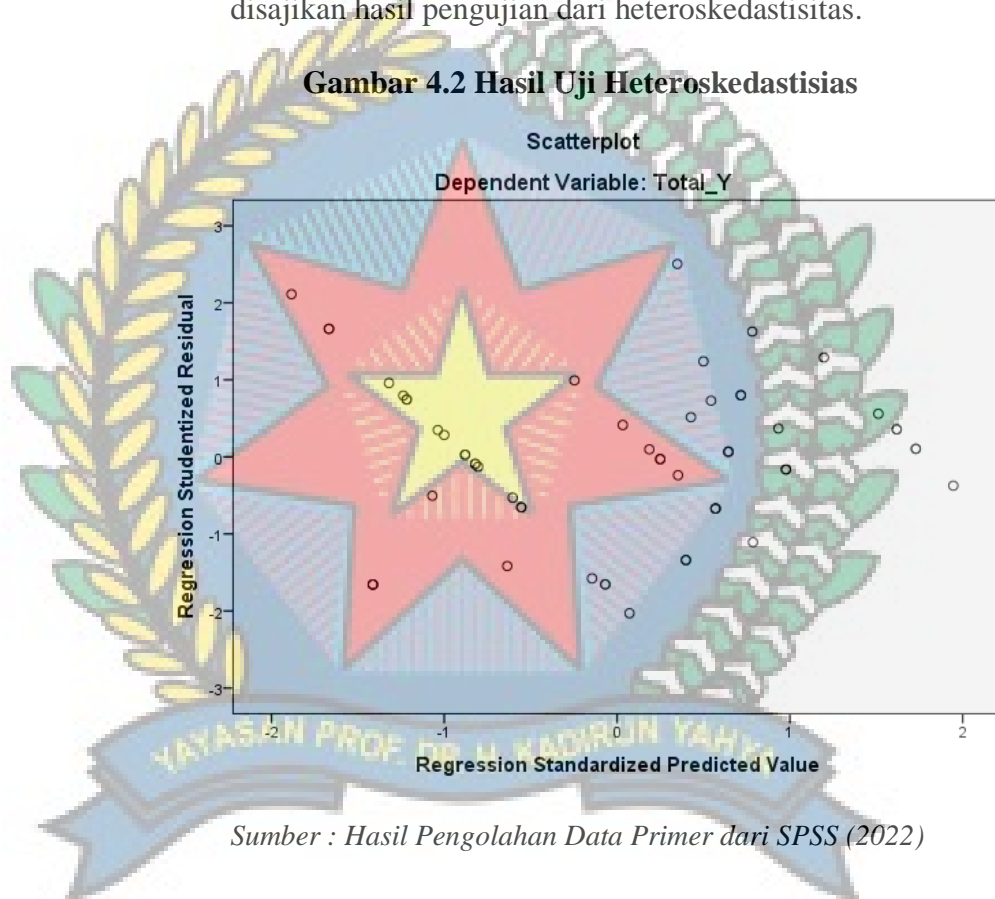
Dari hasil tabel 4.20 diatas yang menyajikan hasil uji multikolinieritas, terlihat bahwa dari kelima variabel independen dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini disajikan hasil pengujian heterokedastitas berupa grafik scatterplot, berikut disajikan hasil pengujian dari heteroskedastisitas.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Berdasarkan gambar 4.2 di atas tampak bahwa grafik scatterplots menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol (0) pada sumbu Y dan tidak terjadi heteroskedastisitas dilihat dari titik yang menyebar dan tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi adanya

heterokedastisitas, sehingga model regresi ini layak untuk memprediksi kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri berdasarkan lima variabel independennya, yaitu independensi, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, dan tekanan waktu.

4.1.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Dyah Nirmala A.J (2012) regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Dalam model ini diasumsikan adanya hubungan satu garis lurus (linear) antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Maka dari itu, regresi linear berganda dapat dirumuskan dalam suatu bentuk fungsi tertentu antara variabel dependen (y) dengan variabel independen (x) atau dapat dinyatakan dalam suatu bentuk persamaan $y=f(x)$. Adapun hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.214	4.477		-1.388	.171
1 Independensi_X1	.025	.160	.017	.158	.875
Objektivitas_X2	.984	.219	.479	4.483	.000
Pengalaman_Kerja_X3	.062	.125	.037	.500	.619
Kompetensi_X4	.299	.160	.227	1.869	.067
Tekanan_Waktu_X5	.517	.120	.360	4.292	.000

a. Dependent Variable: Kualitas_Pengawasan_Y
 Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Dari hasil uji didapatkan model persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini, yaitu:

$$KP = -6,214 + 0,025X_1 + 0,984X_2 + 0,062X_3 + 0,299X_4 + 0,517X_5$$

Hasil interpretasi sebagai berikut:

- 1) Konstanta (α) sebesar -6,214, menunjukkan jika tidak terdapat nilai Independensi (X_1), objektivitas (X_2), pengalaman kerja (X_3), kompetensi (X_4), dan tekanan waktu (X_5) atau sama dengan nol maka kualitas pengawasan (Y) nilainya adalah -6,214.
- 2) Koefisien regresi (β_1) untuk independensi bernilai positif sebesar 0,025 artinya pengaruh independensi terhadap kualitas pengawasan adalah bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya independensi maka kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri semakin baik.
- 3) Koefisien regresi (β_2) untuk objektivitas bernilai positif sebesar 0,984 artinya pengaruh objektivitas terhadap kualitas pengawasan adalah bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan objektivitas yang tinggi maka kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri semakin baik.
- 4) Koefisien regresi (β_3) untuk pengalaman kerja bernilai positif sebesar 0,062 artinya pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas pengawasan adalah bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pengalaman kerja seorang auditor maka kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri semakin baik.

- 5) Koefisien regresi (β_3) untuk kompetensi bernilai positif sebesar 0,299 artinya pengaruh kompetensi terhadap kualitas pengawasan adalah bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kompetensi dari seorang auditor maka kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri semakin baik.
- 6) Koefisien regresi (β_3) untuk tekanan waktu bernilai positif sebesar 0,517 artinya pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas pengawasan adalah bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya tekanan waktu maka kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri semakin baik.

4.1.7 Hasil Uji Hipotesis

Dalam rangka menguji hipotesis mengenai Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu auditor secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan, digunakan pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t dan secara simultan dengan uji F.

4.1.7.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghazali dalam Salsabila (2011) menjelaskan tentang uji t, dengan penjelasan yaitu: uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Ashari (2011) menambahkan mengenai pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, yaitu menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah:

- 1) Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- 2) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Adapun t tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2,00665. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05, jumlah sampel sebanyak 58 orang dengan jumlah variabel sebanyak 5 variabel independen (k). T tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ atau $58-5-1 = 52$ (k adalah jmlah varibel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,00665. Sehingga:

- 1) Jika $t \text{ hitung} > 2,00665$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- 2) Jika $t \text{ hitung} < 2,00665$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dapat juga dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig. dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05.

- 1) Jika p-value < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak.
- 2) Jika p-value > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima.

Adapun hasil uji t tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.214	4.477		-1.388	.171
	Independensi_X1	.025	.160	.017	.158	.875
	Objektivitas_X2	.984	.219	.479	4.483	.000
	Pengalaman_Kerja_X3	.062	.125	.037	.500	.619
	Kompetensi_X4	.299	.160	.227	1.869	.067
	Tekanan_Waktu_X5	.517	.120	.360	4.292	.000

a. Dependent Variable: Kualitas_Pengawasan_Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Penjelasan dari hasil uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh independensi terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa:

a) Nilai t hitung dari independensi adalah 0,158, sehingga
 $t \text{ hitung} = 0,158 < t \text{ tabel} = 2,00665$.

b) Signifikansi dari variabel independensi adalah sebesar
 $0,875 > 0,05$.

c) Hal ini menunjukkan bahwa Ha1 ditolak dan H01 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

2) Pengaruh objektivitas terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa:

a) Nilai t hitung dari objektivitas adalah 4,483, sehingga t hitung = 4,483 > t tabel = 2,00665.

b) Signifikansi dari variabel objektivitas adalah sebesar $0,000 < 0,05$.

c) Hal ini menunjukkan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, artinya objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

3) Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa:

a) Nilai t hitung dari pengalaman kerja adalah 0,500, sehingga t hitung = 0,500 < t tabel = 2,00665.

b) Signifikansi dari variabel pengalaman kerja adalah sebesar $0,619 > 0,05$.

c) Hal ini menunjukkan bahwa H_{a3} ditolak dan H_{03} diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, artinya pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

4) Pengaruh kompetensi terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa:

a) Nilai t hitung dari kompetensi adalah 1,869, sehingga t hitung = 1,869 < t tabel = 2,00665.

b) Signifikansi dari variabel independensi adalah sebesar 0,067 > 0,05.

c) Hal ini menunjukkan bahwa H_{a4} ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak, artinya kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

5) Pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa:

a) Nilai t hitung dari objektivitas adalah 4,292, sehingga t hitung = 4,292 > t tabel = 2,00665.

b) Signifikansi dari variabel objektivitas adalah sebesar 0,000 < 0,05.

c) Hal ini menunjukkan bahwa H_{a5} diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak, artinya tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

4.1.7.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji. Dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5%, pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji semua sub variabel bebas yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun F_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2,39. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05, jumlah sampel sebanyak 58 orang dengan jumlah variabel sebanyak 5 variabel independen (k). $F_{tabel} = f(k, n-k) = f(5,53) = 2,39$

Adapun hasil uji F tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1174.570	5	234.914	44.395	.000 ^b
	Residual	275.154	52	5.291		
	Total	1449.724	57			

a. Dependent Variable: Kualitas_Pengawasan_Y

b. Predictors: (Constant), Tekanan_Waktu_X5, Objektivitas_X2, Pengalaman_Kerja_X3, Independensi_X1, Kompetensi_X4

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dari SPSS (2022)

Penjelasan dari hasil uji simultan (uji F) adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.23, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel independensi, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, dan tekanan waktu secara simultan terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $44,395 > F$ tabel 2,39, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_6 diterima, yang berarti terdapat pengaruh independensi, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, dan tekanan waktu secara simultan terhadap kualitas pengawasan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

4.2 Pembahasan

Berikut ini disajikan data ringkasan hasil pengujian hipotesis penelitian tentang Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).

Tabel 4.24 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Independensi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.	Ditolak
H2	Objektivitas berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Diterima
H3	Pengalaman Kerja berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Diterima
H4	Kompetensi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas	Ditolak

Kode	Hipotesis	Hasil
	Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	
H5	Tekanan Waktu berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Ditolak
H6	Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu secara simultan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Diterima

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

4.2.1 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, menunjukkan bahwa nilai statistik t hitung dari variabel independensi adalah 0,158 sehingga t hitung = 0,158 < t tabel = 2,00665 dengan signifikansi dari variabel independensi (X_1) adalah 0,875 > 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independensi (X_1) tidak berpengaruh signifikan dan secara parsial terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

Secara umum independensi seharusnya berpengaruh terhadap kualitas audit, namun kondisi ini bisa saja terjadi apabila auditor berada dalam posisi dilema dalam melakukan pengawasan, yang memungkinkan hilangnya independensi dalam melaksanakan tugasnya. Faktor lain yang menyebabkan independensi tidak berpengaruh pada kualitas pengawasan karena pada dasarnya auditor telah memiliki sikap independensi, yang merupakan nilai-nilai dasar yang selalu dipegang teguh oleh auditor BPKP dan ditunjukkan

dengan adanya Surat Pernyataan Independensi yang ditandatangani oleh seluruh auditor di dalam satu tim setelah auditor tersebut mendapatkan surat tugas pengawasan dari pimpinan.

Tidak berpengaruhnya independensi terhadap hasil pengawasan dapat dihubungkan dan sesuai dengan teori atribusi dan teori agency. Teori atribusi sebagaimana dinyatakan oleh Fritz Heider selaku pencetus, menerangkan bahwa bagaimana penyebab perilaku individu itu sendiri atau perilaku orang lain yang akan ditentukan apakah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu ataupun faktor internal seperti sifat, karakter, sikap, dan lain sebagainya yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans dalam Ayuningtyas (2012). Sementara itu, di dalam teori keagenan (*agency theory*), BPKP dalam hal ini merupakan *principal*, wajib memberikan informasi ataupun sinyal dan keyakinan secara memadai kepada para *stakeholders*. Sinyal yang diberikan berupa informasi hasil pengawasan yang dapat diandalkan dan dipercayai secara memadai oleh *stakeholders* (Ali, 2002 dalam Setyaningrum, 2013).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukriah et.al. (2009), Putri dan Gede (2014), dan Anggi Chayaning T (2017) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit/pengawasan.

4.2.2 Pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, menunjukkan bahwa nilai statistik t hitung dari variabel objektivitas adalah 4,483 sehingga t hitung = 4,483 > t tabel = 2,00665 dengan signifikansi dari variabel objektivitas (X_2) adalah $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel objektivitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014) yang menyatakan bahwa Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan pengawasan yang dilakukannya. Auditor harus bersikap objektif dalam melaksanakan pengawasan agar dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan penugasan dengan jujur dan tidak berkompromi terhadap kualitas hasil pengawasan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menerangkan bahwa bagaimana penyebab perilaku individu itu sendiri atau perilaku orang lain yang akan ditentukan apakah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu ataupun faktor internal seperti sifat, karakter, sikap, dan lain

sebagainya yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans dalam Ayuningtyas (2012). Selain berkaitan dengan teori atribusi, hasil penelitian ini juga mendukung teori keagenan atau *agency theory* yaitu suatu hubungan berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam suatu perusahaan atau entitas, yakni *principal* (pemilik) dan *agent* (agen) sebagai pelaku utama. BPKP selaku pengawas intern yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan untuk kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri memiliki informasi lebih banyak terkait dengan capaian output dan memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan para *stakeholders. principal* dalam hal ini BPKP, wajib memberikan informasi ataupun sinyal dan keyakinan secara memadai kepada para *stakeholders*. Sinyal yang diberikan berupa informasi hasil pengawasan yang dapat diandalkan dan dipercaya secara memadai oleh *stakeholders* (Ali, 2002 dalam Setyaningrum, 2013).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Haryoko, dkk (2017) yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Obyektivitas, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, Obyektivitas berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas hasil audit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin obyektif auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, maka akan semakin tinggi kualitas hasil audit yang

dihasilkan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang oleh Sukriah (2009) , Harahap (2015), Ilat (2015) dan Furiady dan Kurnia (2015) yang menyatakan ada pengaruh positif obyektivitas auditor terhadap kualitas audit.

4.2.3 Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa nilai statistik t hitung dari variabel pengalaman kerja adalah 0,500 sehingga t hitung = 0,500 < t tabel = 2,00665 dengan signifikansi dari variabel pengalaman kerja (X3) adalah 0,619 > 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja (X3) tidak berpengaruh signifikan dan secara parsial terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori atribusi, yang mana pengalaman kerja merupakan faktor eksternal dalam menilai perilaku auditor.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Furiady dan Kurnia (2015) dan Kovinna dan Betri (2014) yang menyatakan pengalaman kerja tidak berpengaruh pada kualitas hasil audit. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Kukuh Haryoko, dkk, yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas hasil audit. Hasil ini memberi indikasi bahwa semakin berpengalaman seorang auditor, maka semakin baik kualitas hasil audit yang

dihasilkannya.

4.2.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, menunjukkan bahwa nilai statistik t hitung dari variabel kompetensi adalah 1,869 sehingga $t \text{ hitung} = 1,869 < t \text{ tabel} = 2,00665$ dengan signifikansi dari variabel kompetensi (X4) adalah $0,067 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi (X4) tidak berpengaruh signifikan dan secara parsial terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian hipotesis keempat ditolak. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori atribusi, yang mana kompetensi merupakan faktor internal dalam menilai perilaku auditor. Faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya kompetensi terhadap kualitas pengawasan ialah karena setiap penugasan yang dilaksanakan telah memiliki pedoman dan *Tentative Audit Objective (TAO)* yang dapat dipahami oleh auditor yang tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan dengan konsentrasi akuntansi maupun ekonomi, namun juga dapat dipahami dan dimengerti oleh auditor yang memiliki latar belakang pendidikan dengan konsentrasi selain akuntansi maupun ekonomi misalnya auditor yang berlatar belakang pendidikan dengan konsentrasi perpajakan, bea dan cukai, manajemen, teknologi informasi, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Kovinna dan Betri (2014) yang menyatakan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Haryoko, dkk (2017), Furiady dan Kurnia (2015), Harahap (2015), dan Bouhawia dkk (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas hasil audit.

4.2.5 Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima, menunjukkan bahwa nilai statistik t hitung dari variabel tekanan waktu adalah 4,292 sehingga $t \text{ hitung} = 4,292 > t \text{ tabel} = 2,00665$ dengan signifikansi dari variabel independensi (X1) adalah $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel tekanan waktu (X5) berpengaruh signifikan dan secara parsial terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian hipotesis kelima ditolak. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori atribusi, yang mana tekanan waktu merupakan faktor eksternal dalam menilai perilaku auditor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Kurnia dkk. (2014) yang menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut juga sejalan dengan Basuki dan Mahardhani (2006) bahwa keberadaan anggaran waktu yang ketat telah dianggap suatu hal yang

lazim dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja lebih keras dan efisien.

4.2.6 Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam, menunjukkan bahwa nilai statistik F hitung dari variabel independen (X) adalah 44,395 sehingga $F_{hitung} = 44,395 > F_{tabel} = 2,39$ dengan signifikansi dari variabel independen adalah $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_6 diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu secara simultan terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri pada Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti jika Independensi (X1), Objektivitas (X2), Pengalaman Kerja (X3), Kompetensi (X4), dan Tekanan Waktu (X5) secara bersama-sama mengalami kenaikan maka akan berdampak pada kenaikan Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Y), sebaliknya jika Independensi (X1), Objektivitas (X2), Pengalaman Kerja (X3), Kompetensi (X4), dan Tekanan Waktu (X5) secara bersama-sama mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Y).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agung Wardana (2021) yaitu Pengalaman Kerja, Tekanan Waktu, Independensi, Kompetensi dan Objektivitas secara simultan

berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit Penyesuaian Harga pada
Proyek Multi Years Periode 2017 – 2019.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini terdapat 6 (enam) hipotesis yang dianalisis secara statistik menggunakan bantuan aplikasi bantuan *IBM SPSS Statistics 20 (Statistical Package for the Social Sciences)*. Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianalisis terkait Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Independensi tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
2. Objektivitas berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
3. Pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
4. Kompetensi tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.
5. Tekanan Waktu berpengaruh positif dan signifikan secara statistik

terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri.

6. Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu secara simultan berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri. Hasil ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Tekanan Waktu yang dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri yang dihasilkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara senantiasa harus menjunjung tinggi independensi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan. Independensi merupakan salah satu dari nilai-nilai BPKP yaitu PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pada Hasil, Nurani dan akal sehat, Independen, dan Responsibel). Jika dalam melaksanakan pengawasan ada potensi ataupun indikasi independensi auditor dapat terganggu atau kondisi dimana seorang auditor dipaksa untuk mengurangi independensinya, auditor dengan segera harus dapat melakukan komunikasi yang baik dengan rekan sesama tim dan kepada atasannya, agar hal-hal yang sifatnya dapat mengganggu independensi auditor dapat

segera terselesaikan. Selain itu, auditor yang independen tidak hanya harus independen dalam hal kenyataan (*independent in fact*), yaitu kemampuan yang terdapat dalam diri seorang auditor untuk selalu bersikap jujur, objektif, dan bebas dari kepentingan, akan tetapi auditor yang independen juga harus independen dalam hal penampilan (*independent in appearance*) yaitu auditor harus dapat menampilkan dirinya untuk tidak menimbulkan pandangan dari pihak lain yang tidak baik pada diri auditor, sehingga seorang auditor harus dapat mampu menjaga sikap dengan baik serta tidak mudah terpengaruh oleh orang lain.

2. Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat senantiasa bersifat objektif dan meningkatkan sikap objektivitasnya, yaitu dengan bersikap jujur secara intelektual, adil, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, dan bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh orang lain. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas.
3. Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang memiliki pengalaman kerja lebih lama dan lebih memahami proses bisnis dalam melakukan pengawasan, hendaknya senantiasa membimbing dan berbagi ilmu dan pengalamannya kepada auditor yang baru dalam melakukan pengawasan. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor, dapat membantu ketika auditor tersebut menemui permasalahan yang sama di masa yang akan datang, serta dapat menjadi bahan evaluasi diri dan kompetensi auditor untuk senantiasa melakukan pengawasan yang berkualitas.

4. Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dapat senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimiliki baik dari mutu personal, pengetahuan, dan keahlian khusus yang dimilikinya. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan dengan melakukan diskusi interaktif dalam kegiatan pelatihan di kantor sendiri ataupun Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan dapat juga dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (Pusdiklatwas BPKP)
5. Waktu yang telah ditentukan dalam pengawasan, harus dapat digunakan secara maksimal oleh auditor. Penentuan jumlah hari pengawasan harus linear dengan prosedur pengawasan yang disusun pada tahap perencanaan. Untuk meningkatkan Kualitas Pengawasan atas Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri, auditor harus mampu mengidentifikasi titik kritis terjadinya penyimpangan dan melakukan fokus audit sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5.2.2 Saran Akademis

5.2.2.1 Bagi Peneliti Lain

- 1) Bagi peneliti lain yang mungkin melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama, peneliti berharap agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang lebih luas, guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

2) Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini seperti variabel kebijakan organisasi, tingkat etos kerja auditor, etika auditor, profesionalisme, dan tingkat beban kerja masing-masing auditor, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

5.2.2.2 Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi ataupun Pengawasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan kualitas pengawasan yang dipengaruhi oleh independensi, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, dan tekanan waktu, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Sunjoyo dkk, 2013. *Aplikasi SPSS Untuk Smart Riset: Program Ibm SPSS 21*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan. (2008). *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*
- Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah*. Jakarta
- Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah*. Jakarta
- Kemenpan. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta
- Kemenpan. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta
- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- Kuangan, B.P., 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta. *Badan Pemriksa Keuangan Republik Indonesia*.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia

- Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta
- Pusdiklatwas BPKP. (2014). Kode Etik dan Standar Audit Intern
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Jakarta.
- Ali Imron Muhammad, Tri Widya Astuti, Amilin. 2017. Pengaruh Pengetahuan Audit, Independensi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit Investigasi pada Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika*. Volume 1, Nomor 3.
- Ali, I. 2002. Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. *Lintasan Ekonomi* Vol. XIX. No.2. Juli 2002.
- Ayuningtyas, Y.H. 2012. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah)*. Skripsi diterbitkan. (Online).
- Basuki, Mahardhani. 2006. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dan Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Vol.6, No.2, hal. 203-223
- Bouhawia, Mohammed.S., Gugus Irianto, dan Zaki Baridwan. 2015. The Effect of Working Experience, Integrity, Competence, and Organizational Commitment on Audit Quality (Survey State Owned Companies In Libya). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321- 5925. Volume 6, Issue 4. Ver. II (Jul. - Aug. 2015), PP 60-67.
- Carolita, M. K., & Rahardjo, S. N. (2012). pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas hasil audit.(studi pada Kantor AKuntan Publik di Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 771-780.
- Fietoria dan Elisabeth Stefany Manalu. 2016. Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Di Kantor Akuntan Publik Bandung. *Journal of Accounting and Business Studies*. Vol. 1, No. 1.
- Furiadi, Olivia, dan Ratnawati Kurnia. 2015. The Effect of Work Experiences,

Competency, Motivation, Accountability, and Objectivity Toward Audit Quality. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 328 – 335, 2nd Global conference of Business and Social Science-2015, GCBSS-2015, 17-18 September, Bali, Indonesia.

Harahap, Lukman. 2015. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas dan Sensitivitas Etika Profesi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*

Haryoko, K., Nangoi, G. B., & Kalangi, L. (2017). Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).

Ika. Sukriah, Akram dan Biana Adha Inapty. Pengaruh Pengalaman Kerja, , Objektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *SNA XII*. 2009.

Ilat Ventje, David P.E. Saerang, Heince R.N. Wokas. 2015. Pengaruh Independensi, Obyektifitas, Pengalaman Kerja, Pengetahuan, Serta Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.

Indah Fitriani dan Yuga Luthfi Hidayat. 2013. Pengaruh Objektivitas dan Integritas Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1, No. 1, hal 61-72.

Janie, D. N. A. (2012). Statistik deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS. *Jurnal*, April.

Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. Hal 305-360.

Jufrizen, J. (2016). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja Pada PT. Socfin Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis UMSU*, 17(02).

Kovinna, Fransiska dan Betri. 2014. Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, ompetensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang). *Journal.STIE MDP*

Kurnia, W., Khomsiyah, K., & Sofie, S. (2014). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 1(2), 49-67.

Lohonauman, H., Sondakh, J. J., & Kalalo, M. Y. (2018). Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Hasil

Audit Perwakilan Bpkp Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).

Mabruri, Havidz dan Jaka Winarna. (2010). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah". Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Mahanani, S. (2018). Kualitas Pengawasan Keuangan Daerah di Inspektorat Propinsi Jawa Tengah. *Among Makarti*, 11(1).

Muh. Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka. (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X.

Nirmala, R. P. A., & Cahyonowati, N. (2013). Pengaruh independensi, pengalaman, due professional care, akuntabilitas, kompleksitas audit, dan time budget pressure terhadap kualitas audit (Studi Empiris pada Auditor KAP di Jawa Tengah dan DIY). *Diponegoro Journal of Accounting*, 786-798.

Nur Samsi, Akhmad Riduwan, dan Bambang Suryono. "Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit : Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 1. 2013.

Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jaffe, Jeffrey dan Jordan, Bradford D. 2008. *Modern Financial Management*. (8th). New York : McGraw-Hill Companies, Inc.

Salsabila, A. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit, dan Gender Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal* Studi Empiris Pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sripsi diterbitkan. (Online).

Wardhani, V. K., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2014). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Obyektivitas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 63-74.

Winda Kurnia, Khomsiyah, Sofie. 2014. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. *E-Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti*. Volume 1. Nomor 2. Hal 49-67.

Yusuf, M. 2014. Pengaruh Kompetensi, Objektivitas dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor (Studi Empiris pada Auditor BPKP Provinsi Riau). *Jurnal Universitas Negeri Padang*.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210422173834-78-633569/peringkat-utang-ri-didapuk-stabil-di-bbb-layak-investasi> (diakses 17 November

2021)

<https://news.detik.com/berita/d-2314690/auditor-bpkp-akui-terima-duit-dari-kemendikbud#:~:text=Jakarta%20%2D%20Auditor%20Badan%20Pengawasan%20Keuangan,sudah%20mengembalikan%20duit%20ke%20KPK.> (diakses 8 Maret 2022)

<https://www.bpkp.go.id/kalbar/konten/1709/Sejarah-Organisasi.bpkp#:~:text=Sejarah%20terbentuknya%20Badan%20Pengawasan%20Keuangan,perusahaan%20negara%20dan%20jawatan%20tertentu.> (diakses 11 April 2022)

<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/55/Struktur-Organisasi.bpkp> (diakses 11 April 2022)

<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/232/Peran-BPKP.bpkp> (diakses 11 April 2022)

<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/2137/Bagian-Tata-Usaha.bpkp> (diakses 17 Mei 2022)

<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/2677/Koordinator-Pengawasan-P3-APIP.bpkp> (diakses 17 Mei 2022)

<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/864/Koordinator-Pengawasan-IPP-I-dan-II.bpkp> (diakses 17 Mei 2022)

<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/854/Koordinator-Pengawasan-APD-I-dan-II.bpkp> (diakses 17 Mei 2022)

<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/875/Koordinator-Pengawasan-Akuntan-Negara-I-dan-II.bpkp> (diakses 17 Mei 2022)

<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/876/Koordinator-Pengawasan-Investigasi-I-dan-II.bpkp> (diakses 17 Mei 2022)